

**POLITIK KRISIS EKOLOGI:
RESPON KIAI DAN PESANTREN TERHADAP WACANA KRISIS LINGKUNGAN DI
SUMENEP**



Oleh:

Shohebul Umam
NIM: 18200010181

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
TESIS
YOGYAKARTA

Diajukan Kepada Pascasarajana UIN Sunan Kalijaga
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Master of Arts (M.A)
Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi Pekerjaan Sosial
2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Shohebul Umam, S.Sos
NIM : 18200010181
Jenjang : Magister
Program Studi : *interdisciplinary Islamic Studies*
Konsentrasi : Peksos

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang merujuk sumber tertentu.

Yogyakarta, 07 Desember 2021



Shohebul Umam, S.Sos

NIM: 18200010181

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Shohebul Umam, S.Sos
NIM : 18200010181
Jenjang : Magister
Program Studi : *interdisciplinary Islamic Studies*
Konsentrasi : Peksos

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap menerima ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 07 Desember 2021



Shohebul Umam, S.Sos

NIM: 18200010181

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 519709 Fax. (0274) 557978 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-783/Un.02/DPPs/PP.00.9/12/2021

Tugas Akhir dengan judul : POLITIK KRISIS EKOLOGI: RESPON KIAI DAN PESANTREN TERHADAP WACANA KRISIS LINGKUNGAN DI SUMENEP

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SHOHEBUL UMAM, S. Sos
Nomor Induk Mahasiswa : 18200010181
Telah diujikan pada : Jumat, 17 Desember 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Ramadhanita Mustika Sari
SIGNED

Valid ID: 61c50f873910f



Penguji II

Najib Kailani, S.Fil.I., M.A., Ph.D.
SIGNED

Valid ID: 61c47d1d7e37e



Penguji III

Dr. Suhadi, S.Ag., MA
SIGNED

Valid ID: 61c4f0554cd5f



Yogyakarta, 17 Desember 2021

UIN Sunan Kalijaga
Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 61c513b85e010

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamualaikum Wr.Wb

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

Politik Krisis Ekologi:

Yang ditulis oleh:

Nama : Shohebul Umam, S. Sos
Nim : 18200010181
Jenjang : *Interdisciplinary Islamic Studies*
Konsentrasi : Peksos

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar *Magister of Art (MA)*.

Wassalamualaikum Wr. Wb

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 07 Desember 2021

Pembimbing



Najib Kailani, M.A., Ph.D.

ABSTRAK

Tesis ini mengkaji tentang krisis ekologi di Sumenep, Madura. Fenomena krisis ekologi, yang terjadi di Sumenep dalam 10 tahun terakhir, tidak dapat dilepaskan dari gerakan lingkungan yang diinisiasi oleh kiai dan pesantren. Gerakan lingkungan kiai dan pesantren, merupakan sebuah bentuk respon terhadap apa yang mereka sebut sebagai krisis ekologi. Dalam hal ini, kiai dan pesantren, menjadi orkestrator yang menentukan terhadap wacana krisis ekologi di Sumenep. Kemudian, studi ini diletakkan dalam dinamika lanskap politik lokal Sumenep, yang berubah total saat ini. PDI Perjuangan, untuk pertamakalinya sejak Pasca Reformasi, berhasil mendominasi PKB yang berafiliasi dengan kelompok-kelompok kiai dan pesantren, yang terbukti membantunya bercokol di puncak kekuasaan, dalam rentang waktu yang sangat panjang. Oleh karena itu, situasi politik ini, menjadikan gerakan lingkungan kiai dan pesantren, sangat sulit untuk dihindarkan dari aroma kekecewaan dan kepentingan politik sektoral. Kritik keras gerakan lingkungan kiai dan pesantren, ditujukan kepada pemerintah di bawah tatanan politik baru, dengan melemparkan wacana Perda RTRW 2013-2033, sebagai kebijakan yang tidak memperhatikan lingkungan. Walaupun pada kenyataannya, Perda ini diproduksi oleh PKB di bawah pimpinan kiai Busyro Karim, yang sebelumnya dibiarkan oleh kiai dan pesantren.

Pada posisi ini kemudian, gerakan lingkungan kiai dan pesantren, tampak lebih berhasrat menyeret wacana krisis ekologi ke dalam ranah dimensi politik. Akibatnya, diskursus tentang ekologi di Sumenep, tidak mampu diletakkan ke dalam konteks wacana yang lebih luas atau global oleh kiai dan pesantren, misalnya ke dalam wacana antroposen atau SDG's, dan lain sebagainya. Motivasi gerakan hijau, yang dimobilisasi oleh kiai dan pesantren oleh sebab itu, tidak menghasilkan sebuah diskursus baru tentang lingkungan di Sumenep, serta tidak mampu mengedukasi masyarakat secara lebih luas terhadap kesadaran lingkungan.

Penelitian ini merupakan studi kualitatif, dengan mengkaji data yang digali dari beberapa informan, observasi *offline* dan *online* diskusi lingkungan di Sumenep. Tesis ini, menunjukkan bahwa, gerakan lingkungan yang dimotori oleh kiai dan pesantren pada satu sisi, dapat menjadi sebuah gerakan yang mendorong kesadaran lingkungan secara lebih luas di tengah masyarakat Sumenep. Akan tetapi di sisi yang lain, gerakan lingkungan kiai dan pesantren, tidak bisa dilepaskan dari kepentingan politik lokal Sumenep. Wacana krisis ekologi, di dalam masyarakat religius Sumenep oleh karena itu, tidak bertumbuh menjadi sebuah diskursus baru. Ia tidak dapat menerangkan bahwa, krisis ekologi di Sumenep merupakan sebuah fakta empiris, dan benar-benar merugikan masyarakat kecil, seperti petani dan nelayan. Kenyataan ini, merupakan sebuah fakta bahwa, gerakan lingkungan kiai dan pesantren, tidak mampu merekonstruksi *stand of crisis* masyarakat terhadap lingkungan. Sehingga, upaya kiai dan pesantren untuk membangun kesadaran lingkungan, hanya menjadi sebuah narasi politik krisis ekologi, yang tidak menguntungkan bagi kiai dan pesantren.

Kata Kunci: Krisis ekologi, kiai, pesantren, politik.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah saya haturkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan studi S2 dan menyelesaiannya dengan tugas akhir (tesis) yang berjudul **“Politik Krisis Ekologi: Respon Kiai dan Pesantren Terhadap Wacana Krisis Lingkungan di Sumenep”**. Sholawat dan Salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, sang penumpas berhala kepalsuan, melalui cinta kasih yang dibawanya kita sampai di dalam peradaban yang egaliter.

Proses penyusunan tesis ini, penuh lika-liku dan tantangan, terutama saat-saat hendak menggali informasi dari elit-elit lokal di Sumenep. Tema ekologi menjadi tantangan tersendiri, di tengah sengitnya pro dan kontra yang melibatkan pemerintah daerah, elit-elit lokal meliputi: politisi, elit kiai, dan *blater*, membuat isu-isu ekologi menjadi sangat sensitif, terutama di kalangan pemerintah daerah yang baru dihuni oleh penguasa baru. Oleh karena itu, saya menyadari betul bahwa, upaya menggali data dari pemerintah daerah akan relative lebih sulit, dan pada kenyataannya kekhawatiran ini menjadi kenyataan. Surat permohonan untuk penelitian di Sumenep, surat permohonan untuk menjadi nara sumber penelitian kepada Bapak Bupati Sumenep, tidak membantu saya menemukan data yang cukup untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di dalam penelitian ini. Situasi ini cukup membuat saya lelah, dan terbersit untuk mundur perlahan dari tema ekologi. Akan tetapi saya memilih bertahan, karena saya mencium aroma ‘busuk’ di dalam persoalan ekologi di Sumenep.

Hingga pada akhirnya, saya meminta bantuan kepada sanak-saudara, dan jaringan pertemanan di Sumenep, untuk dapat mengakses data-data penting tentang masalah lingkungan hidup di Sumenep. Pada bagian ini, saya dapat mengakses informasi-informasi berharga dan mewah dari beberapa informan yang bersentuhan langsung dengan problem-problem dasar lingkungan hidup di Sumenep. Hasrat untuk membongkar carut-marut degradasi lingkungan di Sumenep pada satu sisi, mendorong saya untuk bekerja lebih keras di dalam proses penyusunan draft penulisan tesis ini, pun juga desakan ‘kewajiban’ lulus pada semester ini juga ‘membakar’ saya untuk segera duduk di kursi sidang, untuk mempertanggung jawabkan tesis-tesis di dalam penelitian sekaligus membeberkan kepada publik tentang problem lingkungan di Sumenep yang terus berjalan pada titik yang mengkhawatirkan. Melalui bimbingan dosen dan bantuan beberapa teman, akhirnya saya bisa menyelesaikan tesis ini.

Pada episode ini, saya ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu, memberikan perspektif baru dan kritis, berkontribusi di dalam membangun narasi apik sehingga tesis atau penelitian ini terwujud, menjadi sebuah draf yang dapat dibaca oleh publik dan semoga memberikan arah baru terhadap diskursus tentang lingkungan, terutama di tengah persoalan rumit mengenai lingkungan di Sumenep. Pertama, Kepada Bapak Najib Kailani, M.A., Ph.D selaku dosen pembimbing, yang sudi menghabiskan waktu untuk membaca, berdiskusi dan membimbing dengan sabar di tengah kesibukannya yang padat, saya ucapkan banyak terimakasih. Tanpa kesabaran dan keikhlasan bapak Najib untuk menghibahkan waktunya untuk penelitian ini, sangga tidak mungkin narasi dalam penelitian ini akan selesai dengan baik. Melalui diskusi dengan beliau, saya banyak mendapatkan perspektif baru dan komprehensif tentang persoalan ekologi. Ke dua, kepada ibu Ro’fah, M.A., Ph.D saya ucapkan banyak terimakasih selaku pembimbing dosen

akademik, yang telah memotivasi saya dan teman-teman untuk segera cepat lulus. Pun juga dengan tema ekologi di dalam penelitian saya, andil beliau sangat besar untuk meyakinkan saya mengeksplorasi persoalan ekologi yang sedang menjadi semangat dunia. Ke tiga, saya ucapan terimakasih kepada Dr. Nina Marini Noor, SS., M.A selaku pimpinan prodi yang sangat responsif terhadap keluhan mahasiswa, dan membantu mengarahkan kebutuhan administrative. Ke empat saya ucapan terimakasih kepada Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S. Ag., M.Ag. sebagai Direktur Pascasarjana yang telah memberikan persetujuan, rekomendasi yang berkaitan dengan surat-menjurat yang saya butuhkan untuk kelengkapan administrasi dalam penelitian tesis saya.

Selanjutnya saya ucapan terimakasih kepada semua dosen-dosen pengampu mata kuliah di Pascasarjana sejak awal semester hingga akhir beliau: Bapak Dr. Moh. Nur Ichwan, S. Ag., M.A., Dr. Muhammad Wildan, M.A., Dr. Abdur Rozaki, S. Ag., M.Si., Dr. Subaidi, S. Ag., M. Si., Zulkipli Lessy, S. Ag., S. Pd., M. Ag., MSW., Ph.D, Ibu Widiyanti, terimaskih telah menjadi dosen yang baik dan berdedikasi di dalam proses pendidikan saya di Pascasarjana.

Tidak lupa kepada istri saya Shofiyatus Zahroh, S. Sos., M. Pd, yang telah membantu mengerjakan hal-hal teknis tesis saya, dan menemani saya tanpa banyak menuntut, saya ucapan terimakasih. Kepada saudara saya, Unsiyah, terimakasih telah menjadi saudara yang sangat baik dengan caranya sendiri, dan membantu hal-hal yang tidak bisa saya lakukan sendiri. selain itu kepada Ponpes Hasyim Asyari atau KUTUB, terimakasih karena telah menjadi tempat terindah selama saya di Yogyakarta. Terakhir saya ucapan terimakasih kepada para informan, terutama kepada Bapak Darul Hasyim Fath, selain memberikan data beliau juga memberikan perspektif-perspektif anti-mainstream yang membuat penelitian ini menjadi lebih kaya, kiai Naqib Hasan, Kiai Jurjiz Muzammil, Kiai Yasin, Kiai Dardiri, Moh Ruysdi, Bapak Maswan, Bapak Ridhafi, Bapak Khalil, terimakasih telah memberikan banyak informasi terkait tesis ini.

Bagi saya, tesis ini menjadi pintu awal untuk terus belajar, dan terus belajar berdedikasi kepada ilmu pengetahuan. Kritik dan saran, sangat saya butuhkan untuk menyempurnakan telah di dalam penelitian ini, guna untuk melahirkan pengetahuan baru di dalam diskurus tentang lingkungan khususnya. Semoga karya kecil ini dapat memberikan deskripsi dan mamfaat bagi para pembaca: peneliti selanjutnya, aktivis lingkungan, hingga pemerintah untuk menyikapi wacana lingkungan dengan cara yang lebih baik.

Yogyakarta, 07 Desember 2021



Shohebul Umam, S.Sos

NIM: 18200010181

HALAMAN PERSEMPAHAN

Tesis ini saya persembahkan untuk ke dua orang tua, Ayahanda Juni dan Ibunda Rasinah, yang selalu mencintai saya



MOTTO

“Verba Volant Scripta Manent”

“Mon Ataneh Atanak, Mon Adhaghang Adhaging”



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
PENGESAHAN	iv
NOTAS DINAS PEMBIMBING	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
HALAMAN PERSEMPERBAHAN	viii
MOTTO	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian.....	9
D. Kajian Pustaka.....	11
E. Kerangka Teori.....	18
F. Metode Penelitian.....	34
G. Sistematika Pembahasan	36

BAB II: POLITIK KRIRIS EKOLOGI: NARASI TENTANG KEHENDAK MEMABANGUN	39
A. Pendahuluan	39
B. Krisis Ekologi di dalam Rentang Perspektif	47
C. Krisis Ekologi dalam Pembangunan Rezim Orde Baru	73
D. Krisis Ekologi dalam Lintasan Post-Pembangunanisme.....	88
 BAB III: GERAKAN POLITIK HIJAU: MOTIVASI KIAI DAN PESANTREN DALAM ISU- ISU KRISIS EKOLOGI DI SUMENEP	100
A. Pendahuluan	100
B. Politik Lingkungan dan Otoritas Keagamaan	108
C. Arah Baru Dakwah Kiai dan Masa Depan Lingkungan Hidup.....	132
D. Kesimpulan.....	141
 BAB IV: WACANA KRISIS EKOLOGI: IDENTITAS POLITIK MASYARAKAT RELIGIUS DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP WACANA ANTROPOSEN	143
A. Pendahuluan	143
B. Identitas dan Kultur Politik Masyarakat Religius	146
C. Gerakan Lingkungan dalam Ruang Lingkup Jaringan Keagamaan	153
D. Parsialitas Gerakan Lingkungan dan Ideologi yang Tergesa-gesa.....	168
E. Kontribusi Masyarakat Religius Terhadap Wacana Antroposen	179
F. Kesimpulan.....	212
 BAB V: PENUTUP	215

A. Kesimpulan.....	215
B. Saran	219
Daftar Pustaka.....	221



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Studi ini, membahas tentang gerakan lingkungan yang diinisiasi oleh pesantren dan kiai di Sumenep, sebagai respon terhadap apa yang mereka sebut dengan krisis ekologi. Kabupaten Sumenep, merupakan daerah yang memiliki kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah, dan dalam 10 tahun terakhir mengalami krisis ekologi yang luar biasa. *Global Warming* menyebabkan perubahan iklim yang tidak menentu, berdampak buruk terutama kepada nelayan dan petani, sebagai profesi terbesar masyarakat Sumenep. Pada posisi ini, gerakan lingkungan yang dimobilisasi oleh kiai dan pesantren, menjadi harapan dan pelita baru bagi masyarakat Sumenep, untuk keluar dari jeratan krisis lingkungan yang terjadi.

Kemudian, studi ini diletakkan dalam dinamika politik lokal Sumenep, yang terus berjalan semakin ketat dari waktu ke waktu. Kontestasi politik lokal Sumenep saat ini, telah berubah arah secara drastis. Sebelumnya, PKB sejak rontoknya jangkar politik Orde Baru Soeharto 1998, menjadi kekuatan tunggal yang tidak bisa ditandingi. Akan tetapi, pada helatan Pemilihan Bupati (Pilbup) 2020, PDI Perjuangan berhasil menghancurkan dominasi gerbong politik PKB, yang berafiliasi dengan kelompok kiai dan pesantren, yang telah membantunya berkuasa dalam rentang waktu yang sangat panjang. Keberhasilan PDI Perjuangan mengambil alih kekuatan politik lokal di Sumenep, untuk pertama kalinya sejak Reformasi, menjadi titik

awal wacana krisis ekologi di Sumenep semakin kencang dihembuskan oleh kiai dan pesantren. Oleh sebab itu, tesis ini berargumen bahwa, gerakan hijau yang dimobilisasi oleh pesantren dan kiai pada satu sisi, menjadi suatu gerakan mulia, dalam upaya membangun kesadaran masyarakat atas lingkungan lestari, akan tetapi di sisi yang lain, gerakan hijau kiai dan pesantren, tidak bisa dilepaskan dari kepentingan politik lokal yang berkembang saat ini.

Dalam konteks ini, yang dimaksud politik adalah kontestasi dalam pengertian politik, juga *everyday politics*. Yaitu, politik sehari-hari yang digunakan oleh kiai dan pesantren, dalam melakukan advokasi lingkungan. Gerakan lingkungan yang dimotori oleh kiai dan pesantren, menggunakan aspek-aspek kebiasaan sehari-hari masyarakat Sumenep, untuk mendistribusikan wacana krisis ekologi. Seperti misalnya, penggunaan kata dengan term religiusitas, seperti kata *mashlahah* dan *mudhrat*, *istigasah* dan lain sebagainya, yang sangat dekat dengan kebiasaan masyarakat Sumenep yang religius. Upaya-upaya ini digunakan oleh kiai dan pesantren, untuk melemparkan sekaligus menggambarkan wacana krisis ekologi di ruang publik, sebagai sebuah situasi sulit yang dihadapi oleh masyarakat Sumenep secara umum, yang harus direspon oleh pemerintah melalui kebijakan yang berpihak kepada rakyat.

Krisis ekologi pada kenyataannya semakin sulit dibendung, karena latar belakang yang mengiringinya berkaitan dengan ekonomi dan politik, yang cenderung menempatkan alam sebagai objek pemenuhan utama. Ratusan hektar lahan produktif di Sumenep, khususnya daerah pesisir, telah dikuasai oleh investor asing, dan dialihfungsikan menjadi tambak udang,

mengancam terhadap kelestarian lingkungan sekaligus perekonomian masyarakat lokal.¹

Berdasarkan data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) 2019, di Sumenep sudah ada tambak udang seluas 117.888 M² (11,87 hektar) hanya di daerah Lombang, dan 108,2 hektar tambak udang di Sumenep secara keseluruhan, baik sudah mengantongi izin atau sedang mengajukan.² Selain itu, pohon Nipah atau disebut pohon *Bhunyok* oleh masyarakat Sumenep, populasinya sudah semakin berkurang saat ini. Jenis pohon yang termasuk family Arecaceae, tumbuhan sejenis palem yang tumbuh subur di daerah bakau, selain daunnya dapat dijadikan atap, jenis pohon ini juga bisa dikelola menjadi gula seperti aren, serta dapat dijadikan sebagai destinasi wisata di daerah pesisir. Akan tetapi kekayaan ini nyaris punah, habis ditebang, dan menyebabkan resapan air di Sumenep menjadi berkurang, mengakibatkan potensi bencana banjir semakin besar.³

Pendekatan politik, hukum, budaya, dan agama, sejauh ini tidak mampu mengendalikan kerusakan pada lingkungan di Sumenep. Alih-alih menghentikan krisis lingkungan, proyek-proyek politik justru seringkali menggambarkan kepentingan sektoral, yang lebih dekat dengan kepentingan korporasi. Dominelli menyebutkan bahwa, krisis

¹ LPP RRI 2021, “Ratusan Hektar Lahan Di Sumenep Mulai Dikuasai Investor Asing”, rri.co.id, 2016, dalam <https://rri.co.id/sumenep/1135-sosial/291365/ratusan-hektar-lahan-di-sumenep-mulai-dikuasai-investor-asing> (diakses pada 8 November, 2021).

² Moh Tamimi, “Lahan Di Sumenep Terkapling-Kapling Dari Tambak Udang Sampai Tambang Fosfat”, Mongabay.co.id, April 26, 2021, dalam <https://www.mongabay.co.id/2021/04/26/lahan-di-sumenep-terkapling-kapling-dari-tambak-udang-sampai-tambang-fosfat/> (diakses pada 10 Juni, 2021).

³ Moh Tamimi, “Masifnya Kerusakan Ekologi Sumenep”, Kabar Madura,” 2019, dalam <https://kabarmadura.id/masifnya-kerusakan-ekologi-sumenep/> (diakses pada 11 Agustus, 2021).

lingkungan merupakan sebuah bentuk ketidakadilan sosial.⁴ Pada titik ini, *de facto* lingkungan dan ranah sosial memiliki relasi yang integral samasekali. Oleh karena itu, proses-proses sosial yang diciptakan oleh manusia, berpengaruh secara signifikan terhadap lingkungan.

Dalam konteks ini, dinamika politik praktis dan politik kebijakan, ekonomi hingga agama, memberikan andil besar terhadap degradasi lingkungan yang terjadi. Persoalan lingkungan oleh karenanya, merupakan problem holistik yang memerlukan pendekatan yang holistic, untuk meminimalisir kemungkinan yang semakin buruk. Namun demikian, upaya menantang degradasi lingkungan, dihadapkan pada narasi pembangunan dan ekonomi yang terjebak di bawah kekuatan besar neoliberalisme, satu ideologi paling kuat saat ini, yang mengangkangi komitmen-komitmen ekonomi dan politik, budaya, kearifan lokal, hingga agama, terpasung oleh kehendak pasar yang mengisyaratkan kompetisi ketat dan keras.

Pertumbuhan ekonomi menjadi frekuensi pertama sekaligus sebagai parameter utama yang mengindikasikan kebahagiaan dan kesejahteraan suatu masyarakat.⁵ Pradigma ini, merupakan kaidah dasar developmentalisme, yang telah menjadi narasi panjang bangsa Indonesia dalam menjaga komitmen, dan pengelolaan lingkungan yang berkeadilan. Sejak rezim otoritarianisme Soeharto (Orde Baru), melalui semangat pembangunanisme, hingga

⁴ Lena Dominelli, *Green Social Work: From Environmental Crises to Environmental Justice* (London: Polity, 2012), 105.

⁵ Lena Dominelli, “Globalization, Contemporary Challenges and Social Work Practic”, *International Social Work* 53, No. 5 (September 2010): 601, dalam <https://doi.org/10.1177/0020872810371201>(diakses pada 17 Juni, 2020).

pengelolaan lingkungan Pasca-Reformasi, komitmen politik dan kebijakan tetap menempatkan alam sebagai objek pembangunan. Hal itu ditunjukkan dengan optimalisasi industri ekstraktif, seperti tambang, log dan lain sebagainya, yang diyakini sebagai jalan utama untuk menopang ekonomi dan kesejahteraan bangsa dari masa ke masa.⁶ Kenyataan ini, telah membuat negara Indonesia secara umum, mengalami ketergantungan terhadap industri ekstraktif, yang terus mendorong krisis lingkungan berkelanjutan.

Sejauh ini, pendekatan politik kebijakan dengan perspektif developmentalisme, hanya menjadi mimpi manis kesejahteraan bagi masyarakat, dan menggiring lingkungan ke dalam situasi yang semakin mengkhawatirkan. Persoalan lingkungan muncul di daerah-daerah kaya sumber daya alam di Indonesia termasuk di Madura, khususnya di dalam wilayah administratif Kota Sumenep. Proses politik kebijakan yang didasarkan atas cita-cita pembangunan masyarakat lokal, dari waktu ke waktu di bawah satu rezim ke rezim lainnya, kali ini menghasilkan kisah yang menyediakan terhadap isu-isu lingkungan di ujung timur Pulau Garam ini.

Kemunduran terhadap komitmen politik dalam mengelola dan menjaga lingkungan di Sumenep, dimulai sejak dilahirkannya Peraturan Daerah (Perda) RTRW (Rancangan Tata Ruang Wilayah) 2013-2033 oleh KH. Busyro Karim sebagai Bupati terpilih dua periode 2009-

⁶ Herman Hidayat, *Politik lingkungan: pengelolaan hutan masa Orde Baru dan reformasi* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), 30-137.

2014, dan 2015-2020. Perda ini oleh beberapa pemerhati lingkungan di Sumenep, dinilai sebagai pintu gerbang utama yang akan membawa persoalan pelik terhadap lingkungan lestari di Sumenep.⁷ Kekhawatiran ini, ternyata terbukti oleh realitas krisis ekologi yang terjadi di Sumenep dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Ada begitu banyak fenomena menyedihkan terkait lingkungan di Sumenep, seperti misalnya pembelian tanah secara massif oleh investor Cina, pembangunan proyek perumahan di jantung kota yang tidak memperhitungkan Perda, menyebabkan menyempitnya volume tanah. Kemudian, membeludaknya tambak udang di pesisir Sumenep, telah merusak ekosistem laut karena limbahnya tidak dikelola dengan baik. Fenomena ini, menjadi episode buruk bagi masa depan lingkungan di Sumenep. Situasi ini sangat tidak menguntungkan bagi masyarakat kecil, khususnya nelayan dan petani, sebagai populasi terbesar di Sumenep. Oleh sebab itu, situasi ini mendapat reaksi keras dari masyarakat, khususnya dari kalangan elit kiai di berbagai pesantren sebagai simbol masyarakat religius Sumenep.

Eksistensi kiai dan pesantren di Sumenep, sangat menentukan terhadap pola dan kondisi sosial-politik, termasuk pula menentukan terhadap perkembangan wacana lingkungan. Posisi pesantren yang berada di antara lingkungan masyarakat pedesaan, yang secara dominan masyarakatnya hidup secara agraris, membuat pesantren bersentuhan

⁷ Wawancara dengan K. Dardiri Zubair, Aktivis Lingkungan dan Pengasuh Pondok Pesantren Nasyi'atul Muta'allimin Gapura Timur.

langsung dengan kehidupan masyarakat, baik dalam sisi teologis atau pun dari sisi sosial.

Suatu keadaan yang berimplikasi terhadap pengembangan watak dan karakter masyarakat.

Pada bagian ini seperti yang dikatakan oleh Houben bahwa, Islam sebagai agama tampak tidak

hanya menjadi fakta teologis yang terbatas pada wilayah ritual-ritual sakral, akan tetapi juga

menjadi *wordviews, petodhu*⁸ (*way of life*) bagi para pemeluknya, mulai dari hal-hal yang

bersifat teologis hingga praktis, dari ruang individu yang privat hingga ruang publik.⁹

Pesantren oleh sebab itu, menjadi ruang inklusif dan multidisiplin, seperti yang

dikatakan oleh Khitam bahwa, umat Islam di Indonesia menempatkan pesantren sebagai salah

satu episentrum gerakan lingkungan.¹⁰ Asumsi ini terkesan mewah dan relevan, mengingat

pesantren telah mampu membangun ikatan sosial dengan masyarakat. Tetapi demikian, pada

posisi ini, tesis-tesis yang menyebutkan bahwa pesantren sebagai lembaga multidisiplin

penting untuk diuji dalam konteks kemaduraan. Khususnya, terkait dengan diskursus

lingkungan hidup, di mana sejauh ini tesis pesantren dan lingkungan hidup terlampaui

bernuansa romantik, tetapi dalam porsi diskursus yang sedikit, pun juga dalam scope yang

sempit.

⁸ *Petodhu*, adalah bahasa Madura yang berarti petunjuk. *Petodhu* bagi orang Madura hanya muncul dari pengalaman spiritual (Allah), dan lahir dari orang-orang suci seperti kiai dan ulama yang memiliki pengetahuan agama Islam.

⁹ Vincent J. H. Houben, “Southeast Asia and Islam”, *The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science* 588, No. 1 (July 1, 2003): 149, dalam <https://doi.org/10.1177/0002716203588001010> (diakses pada 4 November, 2021).

¹⁰ Husnul Khitam, “Kontekstualisasi Teologi Sebagai Basis Gerakan Ekologi”, *DINIKA : Academic Journal of Islamic Studies* 1, No. 2 (August 31, 2016): 143–44, dalam <https://doi.org/10.22515/dinika.v1i2.62> (diakses pada 2 Februari, 2021) (diakses pada 3 November, 2021).

Tradisi berpikir pesantren di Sumenep, khususnya yang bersentuhan dengan diskursus lingkungan pada satu sisi perlu untuk disoal kembali, di tengah semakin kusutnya persoalan lingkungan di Sumenep. Sedangkan di sisi yang lain, gerakan hijau yang diinisiasi oleh kiai dan pesantren, sejauh ini tampak menemui jalan buntu dan menguap begitu saja di dalam mengadvokasi kasus-kasus lingkungan di Sumenep. Suatu gejala yang mengindikasikan bahwa, eksistensi kiai di dalam dinamika politik lokal tengah mengalami pergeseran. Berangkat dari situasi ini, penulis berargumen bahwa: 1) kasus lingkungan hidup di Sumenep, dilatar belakangi oleh sosial ekonomi-politik lokal yang mengalami pergeseran signifikan; 2) tidak bertumbuhnya diskursus lingkungan hidup di dalam semua dimensi masyarakat, membuat krisis lingkungan menjadi isu yang tidak menarik bagi masyarakat kecil (*grass root*); 3) gerakan hijau yang dimobilisasi kiai tidak mampu mengubah situasi degradasi lingkungan, gerekan mereka membentur oligarki yang diisi oleh identitas yang sama seperti dirinya sendiri yakni, kiai; 4) gerakan ekstra parlementer (termasuk kiai dan pesantren) tidak mampu menggugah pengetahuan tentang lingkungan hidup di dalam lingkungan pemerintah, akademik, dan masyarakat umum; 5) gerakan hijau di Sumenep lebih banyak diinisiasi oleh elit kiai dari beberapa pesantren besar dibandingkan oleh gerakan *civic* akademik; 6) gerakan lingkungan kiai dan pesantren pada satu sisi dapat dimaknai sebagai gerakan mulia untuk membangun kesadaran masyarakat atas lingkungan, akan tetapi di sisi yang lain gerakan lingkungan kiai dan pesantren juga tidak dapat dilepaskan dari kepentingan politik lokal; 7)

kiai dan pesantren di dalam memobilisasi gerakan hijau ini, tidak mampu meletakkan wacana krisis ekologi ke dalam konteks wacana global, seperti misalnya ke dalam diskursus antroposen ataupun SDG's. Sehingga, wacana krisis ekologi di Sumenep, tidak tumbuh sebagai diskursus baru yang dapat membangun pengetahuan masyarakat secara lebih luas terhadap kesadaran lingkungan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengeksplorasi secara lebih mendalam krisis ekologi di Sumenep melalui gerakan hijau yang dimobilisasi oleh kiai melalui kelompok-kelompok keagamaan yang dikontestasikan sebagai otoritas kepada pemerintah daerah. Maka dari itu, penelitian ini menjawab pertanyaan:

1. Bagaimana narasi ekologi sejak Orde Baru hingga Pasca- Reformasi?
2. Apa Motivasi Pesantren dan kiai bergerak dalam isu-isu lingkungan di Sumenep?
3. Bagaimana kontribusi masyarakat religius Sumenep dalam wacana antroposen?

C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskusikan keterlibatan kiai, pesantren dan sejumlah kelompok otoritas keagamaan ke dalam isu-isu lingkungan hidup di Sumenep. Fokus yang ingin dilihat dalam penelitian ini adalah, memahami secara mendalam dan komprehensif gerakan hijau yang dimotori oleh kiai apakah mampu mengehentikan krisis ekologi yang semakin memburuk di Sumenep. Kemudian, bagaimana langkah-langkah strategi advokasi

yang dilakukan oleh kiai di dalam menyuarakan degradasi lingkungan yang terjadi kepada pemerintah. Selain itu, isu lingkungan yang masih terlalu elitis sejauh ini, telah melahirkan tokoh-tokoh baru kiai muda yang mencoba mengkontestasikan otoritas keagamaan dengan otoritas pemerintah, memberikan nuansa kontestasi politik yang begitu ketat dan keras di panggung politik lokal. Bagaimana narasi dan prinsip-prinsip etika lingkungan di dalam hukum Islam dijadikan sebagai narasi utuh dan mendasar di dalam melakukan gerakan hijau menghalang bercokolnya pemodal di Sumenep.

Tesis ini berkontribusi dalam melihat fenomena krisis ekologi di Indonesia secara umum, dan di Sumenep secara khusus secara lebih luas dengan pandangan yang tidak biasa. Kajian-kajian yang ada tentang krisis ekologi cenderung menempatkan pesantren dan isu lingkungan hidup begitu romantic, melalui narasi agung yang mencitrakan pesantren sebagai pengelola utama moral dan lingkungan dalam konteks yang terbatas. Selain itu penelitian ini mengkritisi narasi yang menempatkan alam sebagai objek eksloitasi untuk menopang pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, seperti yang ditunjukkan di dalam era Orde Baru hingga pasca Reformasi. Di dalam fenomena gerakan hijau yang mulai marak di Sumenep, tidak hanya tampak semangat untuk menyelamatkan lingkungan oleh para elit kiai, tetapi sekaligus semangat untuk mengokohkan identitas melalui gerakan yang tidak sistematis, parsial, tidak terorganisir, dan tidak ditopang oleh ideologi yang kuat.

D. Kajian Pustaka

Isu krisis lingkungan hidup di Indonesia memiliki narasi panjang dengan perjalanan politik dari satu rezim ke rezim lainnya yang berkuasa. Beberapa studi yang ada, wacana lingkungan hidup memiliki tiga kecendrungan diskusi utama: *pertama*, studi yang melihat krisis ekologi dari perspektif ekonomi politik. Kecendrungan diskusi ini, umumnya dibongkar dari sejak kekuasaan Soeharto yang populer disebut Orde Baru, hingga pasca Reformasi ketika sistem pemerintahan dan politik berubah signifikan menjadi desentralisasi. Dalam salah satu penelitiannya, Dauvergne melihat bahwa sikap elit pemerintah Orde Baru yang memiliki otoritas penuh terhadap kebijakan, mengambil langkah penuh terhadap kebijakan pembangunan yang menjadi faktor penting di balik kebijakan deforestasi.¹¹ Kebijakan ini disandarkan pada pengalaman kolonial yang mendasarkan pemahaman ala Barat tentang pembangunan melalui konsep yang tidak jauh berbeda dengan industrialisasi. Melalui langkah-langkah politik kebijakan ini, pemerintah Orde Baru menekankan pembangunan sebagai upaya melancarkan rencana stabilitas politik dan integrasi nasional.¹² Kaidah-kaidah politik pembangunan Orde Baru oleh karena itu, menurut Li telah melahirkan kesenjangan ekonomi, politik dan sosial sekaligus menunjukkan kehendak membangun yang tidak mengedepankan perspektif masyarakat, demi melancarkan proyek pembangunan yang

¹¹ Peter Dauvergne, “The Politics of Deforestation in Indonesia”, *Pacific Affairs* 66, No. 4 (1993): 506, dalam <https://doi.org/10.2307/2760676> (diakses pada 26 Juni, 2021).

¹² *Ibid.*, hlm. 506.

berbasis industri ekstraktif yang telah menyumbang penuh terhadap kerusakan lingkungan di Indonesia.¹³

Setelah jangkar politik Orde Baru karam, sistem desentralisasi dan otonomi daerah yang diamanatkan oleh Reformasi, tidak membawa perubahan mendasar tentang politik lingkungan. Hidayat dalam penelitiannya, memperlihatkan komitmen pemerintah kala itu tidak bulat untuk melakukan restrukturisasi terkait kebijakan kehutanan.¹⁴ Peran CGI (*Consultative Groups on Indonesia*) atau negara konsultan untuk Indonesia, tidak mampu mendorong pembaruan peraturan atas sektor kehutanan, meskipun Kepres Nomor 80/2000 memutuskan untuk membuat Komisi antar Departemen atas Kehutanan, untuk meredefinisi kembali sekaligus menerapkan program kehutanan baru mencakup: penegakan hukum atas aktivitas *illegal logging*, menjaga dan merawat Sumber Daya Alam, mengoreksi dan mengkritisi kebijakan terkait konversi lahan dan hutan, melakukan *moratorium* atau pemberhentian terlebih dahulu semua konversi lahan dan hutan, hingga program kehutanan selesai diratifikasi, merestrukturisasi industri kehutanan, menutup industri kehutanan, memperbaiki kompetisi produk kehutanan.¹⁵ Akan tetapi menurut Hidayat, program pembaruan ini sangat disayangkan karena tidak dijalankan dengan maksimal oleh Komisi Antar Departemen atas Kehutanan, sebagai lembaga sentral untuk pembaruan sektor

¹³ Tania Murray Li, *The Will to Improve: Governmentality, Development, and the Practice of Politics* (Duke University Press, 2007).

¹⁴ Hidayat, *Politik lingkungan...,* hlm. 141.

¹⁵ *Ibid.*

kehutanan, serta tidak didukung oleh pemerintah dari tingkat nasional hingga lokal, karena birokrat kala itu lebih tertarik untuk melakukan reformasi struktur pemerintahan dibandingkan kebijakan pengelolaan kehutanan.¹⁶

Pola pengelolaan lingkungan dari waktu ke waktu di Indonesia, tidak jauh berbeda dari sejak layar kapal Orde Baru berkibar dengan semangat pembangunanisme dengan sistem sentralisasi, hingga kapal kendali dinahkodai oleh Jokowi kebijakan pengelolaan lingkungan masih bernuansa industrialisasi dengan menekankan pada narasi pembangunan. Warburton menyebutkan bahwa, Jokowi dan developmentalisme gaya barunya, mendorong secara membabi-buta pembangunan ekonomi dan infrastruktur, yang berakibat pada permasalahan lingkungan dan kesenjangan sosial-ekonomi masyarakat.¹⁷ Asumsi ini tidak berlebihan mengingat bahwa, tidak sedikit reaksi keras masyarakat dan kelompok-kelompok *civil society* menilai kebijakan Jokowi tidak mengedepankan keadilan lingkungan, dengan lebih banyak merekomendasikan daerah-daerah untuk dieksplorasi oleh beberapa perusahaan-perusahaan besar, meninggalkan preseden buruk bagi masa depan lingkungan hidup di Indonesia.

Ke dua, studi sebelumnya cendrung melihat krisis ekologi dari term filosofis. Dalam konteks filosofis, metode berpikir rasionalisme ala Cartesian yang menempatkan alam dan manusia tidak berdiri secara integral atau dualistic, menampilkan arah berpikir subjek-objek,

¹⁶Ibid., hlm. 142.

¹⁷ Eve Warburton, “Jokowi and the New Developmentalism”, *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 52, No. 3 (September 1, 2016): 297–320, dalam <https://doi.org/10.1080/00074918.2016.1249262> (diakses pada 27 Juni, 2021).

di mana manusia sebagai subjek dan alam sebagai objek, yang dapat dieksplorasi dan dieksplorasi demi menopang kepentingan manusia. Keraf menyebutkan bahwa, dasar filsafat rasionalisme, manusia menempatkan dirinya sebagai pusat utama dari seluruh ekosistem yang berlangsung di alam semesta, atau apa yang sering disebut sebagai kaidah-kaidah antroposentrisme.¹⁸ Suryajaya mengatakan bahwa, antroposentrisme yang tumbuh di dalam tradisi modernitas, mengkonstruksi nilai-nilai etisnya tentang lingkungan yang didasarkan secara penuh kepada manusia.¹⁹ Oleh karena itu, dalam pengertian ini manusia menjadi penentu satu-satunya yang dapat memetakan apakah lingkungan atau alam memiliki nilai etis atau tidak.

Sejauh ini, alam dalam perspektif etis masyarakat modern, *de facto* tidak diyakini memiliki nilai-nilai etis secara interinsik, sehingga alam dipandang sebagai entitas ke dua setelah manusia. Session sebagai seorang Marxis mengatakan bahwa, manusia adalah tokoh utama segala bentuk helatan kehidupan di dunia, manusia bertugas penuh sebagai penentu perubahan sebagai sebuah keniscayaan.²⁰ Akan tetapi di sisi yang lain, prinsip etis ini ditentang oleh penganut ekosentrisme. Nurmardiansyah mengatakan, gagasan utama ekosentrisme terutama adalah tentang moralitas kosmis yang melibatkan manusia dan alam

¹⁸ A. Sonny Keraf, *Etika lingkungan hidup* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010), 47.

¹⁹ Martin Suryajaya, “Antroposentrisme Dan Krisis Lingkungan Hidup”, Martin Suryajaya, February 7, 2020, 7, dalam <https://www.martinsuryajaya.com/post/antroposentrisme-dan-krisis-lingkungan-hidup> (diakses pada 22 Desember, 2020).

²⁰ George S. Sessions, “Anthropocentrism and the Environmental Crisis”, *Humboldt Journal of Social Relations* 2, No. 1 (1974): 73 dalam <https://www.jstor.org/stable/23261527> (diakses pada 30 Desember, 2020).

secara integral-interkoneksi di dalam organisasi kosmis.²¹ Dalam pandangan ekosentrisme, etika tidak hanya terbatas pada manusia saja, tetapi diperluas pada seluruh bagian ekologis, jadi setiap makhluk hidup memiliki nilai moral pada dirinya sendiri, tidak terkecuali alam. Etika ekosentrisme banyak didukung oleh tokoh-tokoh seperti Naes, Muir dan masih banyak lagi yang memandang bahwa, manusia dan alam memiliki ketersalingan yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya.

Ke tiga, studi-studi sebelumnya melihat fenomena krisis ekologi sebagai bentuk kegagalan moral manusia di dalam memahami alam. Kesimpulan ini muncul dari argumen atau perspektif agama, di mana penelitian sebelumnya tentang hukum Islam dan lingkungan telah banyak disentuh oleh beberapa sarjana atau ekspertis, baik dari dalam negeri ataupun luar negeri. Gade dalam penelitiannya tentang hukum Islam dan lingkungan, menyorot dakwah dan fatwa yang dikeluarkan oleh beberapa organisasi otoritas keagamaan seperti NU dan MUI, di dalam memberikan pandangan tentang hukum Islam memandang permasalahan ekologi.²²

Menurut Gade dalam penelitian ini, fatwa dan dakwah yang dikeluarkan oleh otoritas keagamaan tentang lingkungan hidup, menekankan pada prinsip etik manusia di dalam membangun hubungan dengan manusia, di mana prinsip-prinsip atau ajaran Islam, membantu

²¹ Eko Nurmardiansyah, “Eco-Philosophy dan Implikasinya dalam Politik Hukum Lingkungan di Indonesia,” *MELINTAS* 30, No. 1 (April 1, 2014): 87, dalam <https://doi.org/10.26593/mel.v30i1.1283.70-104> (diakses pada 22 Desember, 2020).

²² Anna M. Gade, “Islamic Law and the Environment in Indonesia: Fatwa and Da‘wa”, *Worldviews: Global Religions, Culture, and Ecology* 19, No. 2 (January 1, 2015): 161–183, dalam <https://doi.org/10.1163/15685357-01902006> (diakses pada 22 Desember, 2020).

membentuk kesalehan manusia yang dapat mencegah eksplorasi terhadap alam, sekaligus memberikan referensi penting bagi negara untuk memproduksi wacana tentang peraturan kesadaran lingkunganisme.²³

Selain Gade, Mangunjaya dan McKay menelusuri peluang tesis-tesis agama, sebagai upaya baru yang dapat dilakukan untuk menghentikan aktivitas eksploratif manusia terhadap alam, di tengah pendekatan politik dan hukum yang tidak berjalan secara suprematif sejauh ini.²⁴ menurut Mangunjaya, agama Islam memiliki item-item yang sempurna untuk melakukan pendekatan penyelesaian kerusakan terhadap lingkungan, di mana ajaran-ajaran Islam menerjemahkan segala bentuk relasi integratif antara manusia dengan alam, yang dapat dijadikan sebagai pendekatan utama, untuk membentuk nilai-nilai dasar manusia yang berkesadaran lingkungan lestari.

Akan tetapi, tesis-tesis tentang ajaran agama, dalam hal ini adalah hukum Islam yang bersifat apokaliptis, pun tidak memiliki legitimasi yang dapat menjamin krisis ekologi dapat dihentikan. Perangkat transenden di dalam diri manusia, seperti yang digambarkan oleh Quddus sebagai acuan moral hidup, saat ini telah menjadi kering, karena gempuran teknologi dan sains yang minus wawasan dan nilai-nilai spiritual, menjadi energi utama yang

²³ *Ibid.*, hlm. 167.

²⁴ Fachruddin M. Mangunjaya and Jeanne Elizabeth McKay, “Reviving an Islamic Approach for Environmental Conservation in Indonesia”, *Worldviews: Global Religions, Culture, and Ecology* 16, No. 2 (2012), dalam <https://doi.org/10.1163/15685357-01603006> (diakses pada 01 Oktober, 2021).

menggerakkan manusia untuk melakukan eksplorasi terhadap alam.²⁵ Akibatnya, kehancuran lingkungan semakin meningkat dari waktu ke waktu. Bahkan dalam kasus ini, Indonesia tercatat sebagai negara penghancur hutan tercepat, dengan rata-rata 1,871 juta hektar pertahun, atau 2 persen dari hutan yang tersisa.²⁶ Bahkan WALHI pernah mencatat, angka penghancuran hutan tersebut pernah mencapai 3,4 juta hektar pertahun, dengan kerugian mencapai 40-65 triliun setiap tahun.²⁷ Lynn White melihat krisis ekologi, sebagai sebuah ketidakmampuan manusia untuk menerjemahkan kekuasaan Tuhan, yang disimbolkan melalui penciptaan alam itu sendiri.²⁸ White melihat, revisi ilmu pengetahuan dan teknologi yang berjalan begitu pesat, membutakan mata hati manusia, dan merusak kerendahan hati, sehingga manusia terus berusaha menjadi raja bagi alam semesta, yang menempatkan dirinya sebagai subjek penentu satu-satunya atas alam.²⁹

Berangkat dari studi-studi di atas, peneliti melihat perkembangan krisis ekologi di Sumenep, tidak hanya berada di dalam persoalan ekonomi dan politik, tetapi juga sekaligus menyentuh sisi teologi masyarakat Sumenep yang fanatis terhadap isu-isu agama. Dalam hal ini, keterlibatan kiai dan pesantren sebagai gerakan *civil society*, yang menginisiasi gerakan

²⁵ Abdul Quddus, "Ecotheology Islam: Teologi Konstruktif Atasi Krisis Lingkungan," *Ulumuna* 16, No. 2 (2012): 312–313, dalam <https://doi.org/10.20414/ujis.v16i2.181> (diakses pada 22 Desember, 2021).

²⁶ *Ibid.*, hlm. 316.

²⁷ "Riset Persepsi Publik Terhadap Kejahatan Korporasi Dan Ekosida," WALHI, January 4, 2021, <https://www.walhi.or.id/riset-persepsi-publik-terhadap-kejahatan-korporasi-dan-ekosida>.

²⁸ Lynn White, "The Historical Roots of Our Ecologic Crisis," in *Science* 155, No. 3767 (1967): 1203–1207 dalam <http://www.jstor.org/stable/1720120> (diakses pada 22 Desember, 2021).

²⁹ *Ibid.*, hlm. 1205.

lingkungan tampak mengedepankan narasi keagamaan, sehingga wacana krisis ekologi, masuk dalam termin ekoteologi yang mesti dilihat lebih jauh, di dalam isu-isu krisis ekologi di Sumenep. Fokus yang dilihat dalam wacana krisis ekologi di Sumenep adalah, bagaimana kiai sebagai katalisator utama masyarakat menyuarakan kehendak umum dan ideal masyarakat terkait isu-isu lingkungan yang menjadi sensitif dalam 10 tahun terakhir di Sumenep. Dalam hal ini, strategi kiai di dalam melakukan upaya-upaya gerakan, bersinggungan dengan kepentingan ekonomi dan politik pemerintah di tengah usaha pembangunan Sumenep. Perbedaan tesis ini dengan penelitian sebelumnya adalah, tidak hanya melihat dinamika isu-isu lingkungan hidup dari perspektif Islam yang dimotori oleh kiai, akan tetapi lebih jauh melihat bagaimana prinsip-prinsip Islam dan lingkungan dilemparkan sebagai wacana global, bagaimana ajaran-ajaran Islam di tengah masyarakat religius seperti Sumenep, berkontribusi terhadap wacana antroposen atau diskursus yang lebih luas, yang menjadi perhatian baru di kalangan akademik secara global.

E. Kerangka Teori

Thinking green dan green thought

Diskursus tentang lingkungan merupakan sebuah diskusi yang menyentuh semua disiplin ilmu pengetahuan, oleh sebab itu wacana ekologi dapat disebut sebagai wacana multidisiplin yang memperlihatkan bahwa, dunia menghadapi permasalahan lingkungan hidup yang sangat serius (*environmentalism*), dan oleh karena itu manusia dipaksa untuk

berpikir hijau (*thinking green*).³⁰ Secara sederhana, *thinking green* dalam ruang lingkup yang terbatas, dapat didefinisikan sebagai sebuah langkah memasukkan isu-isu lingkungan hidup ke dalam berbagai perspektif atau teori lainnya, termasuk ke dalam konteks praktis seperti ke dalam wacana pekerjaan sosial.³¹ Maka dari itu, wacana lingkungan hidup menjadi sebuah isu krusial yang nyaris mendapat perhatian semua kalangan akhir-akhir ini. Pemanasan global, perubahan iklim yang ekstrim, kerusakan ekosistem, berkurangnya keanekaragaman hayati, bencana alam yang semakin lumrah terjadi; banjir, longsor, angin badai, kebakaran hutan, adalah persoalan yang menjadi kekhawatiran sekaligus menyeret perhatian masyarakat dunia, karena isu degradasi lingkungan berdampak pada masa depan sekaligus kesejahteraan umat manusia.³² Pada posisi ini, tampak bahwa lingkungan merupakan gambaran keseluruhan watak, sikap, dan perilaku manusia.

Green thought secara sederhana merupakan inti dari ekologisme yang menggambarkan secara kompleks bagaimana tantangan isu-isu lingkungan dapat diselesaikan. Pada wilayah ini, perspektif ekologisme, menempatkan sistem negara kontemporer yang mengarusutamakan ekonomi, serta penggunaan ilmu pengetahuan dan

³⁰ Faisyal Rani, “Perspektif Green Thought Dalam Paradigma Baru Politik Internasional (Teori Dan Praktek)”, *Transnasional* 4, No. 2 (May 23, 2013): 873 dalam <https://ejournal.unri.ac.id/index.php/JTS/article/view/1210> (diakses pada 01 Mei, 2019).

³¹ Barbra A Teater, “Social Work Practice from an Ecological Perspective,” in *Case Studies in Social Work Practice* (New York, NY: Wiley-Blackwell, 2014), 2.

³² Heather Boetto, “A Transformative Eco-Social Model: Challenging Modernist Assumptions in Social Work”, *The British Journal of Social Work* 47, No. 1 (January 1, 2017): 50, dalam <https://doi.org/10.1093/bjsw/bcw149> (diakses pada 02 Juni, 2020).

tekonologi secara ekstensif sebagai pendekatan penyelesaian degradasi lingkungan, dituding sebagai penyebab dasar kerusakan terhadap lingkungan.³³ Pada posisi ini secara implisit konsep *green thought* menjelaskan bahwa, relasi antara manusia dengan alam yang menyimpulkan suatu krisis yang dalam, harus kembali disusun sebagai upaya untuk memperbaiki setiap fase hubungan itu sendiri untuk menciptakan planet dan masa depan yang aman.³⁴ Inti dari pandangan *green thought* adalah, meyakini bahwa dunia disusun oleh rangkaian ekosistem yang saling terkait satu dengan yang lainnya, maka dari itu, tidak mungkin membuat pembagian yang tegas antara manusia dengan makhluk hidup yang lainnya. *Green thought* secara sadar, menawarkan sebuah konsep berpikir yang bersifat holistic tentang hubungan manusia dengan alam, yang menyorot hubungan manusia dengan ekonomi, politik, dan budaya di dalam nuansa kontemporer.³⁵

Green thought menuntut perubahan mendasar dan radikal di dalam sistem ekonomi dan politik kontemporer, sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan bagi spesies non manusia di dalam organisasi dunia.³⁶ Beberapa hal yang menjadi pertimbangan konsep ini, yang diyakini dapat mereorganisasi relasi manusia dengan alam secara integral meliputi:

³³ Andreas Lako, “Menghijaukan Ekonomi, Bisnis & Akuntansi”, 2015, 2. Dalam https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=Menghijaukan+Ekonomi%2C+Bisnis+%26+Akuntansi&btnG= (diakses pada 09 April, 2020)

³⁴ Andrew Dobson et al., “Trajectories of Green Political Theory” *Contemporary Political Theory* 8, No. 3 (August 1, 2009): 317–325, dalam <https://doi.org/10.1057/cpt.2009.11>(diakses pada 07 November, 2021).

³⁵ *Ibid.*, hlm. 333.

³⁶ Jennifer Clapp and Peter Dauvergne, *Paths to a Green World, Second Edition: The Political Economy of the Global Environment* (London: MIT Press, 2011), 19–26.

menolak dengan tegas terhadap pandangan-pandangan antroposentris, karena menempatkan manusia sebagai pusat ekosistem; menentang dengan keras terhadap semua bentuk strategi pembangunan (*developmentalism*) yang mengutamakan pertumbuhan ekonomi di atas semua kualitas hidup; meyakini bahwa, intervensi manusia dalam hukum alam saat ini menjadi ancaman nyata terhadap keberlangsungan hidup manusia sendiri dan non-manusia di sisi yang lainnya; mendesak perubahan secara radikal terhadap struktur sosial, ekonomi, politik, teknologi dalam sistem dunia; memisahkan dengan tegas antara kebutuhan dan kepentingan atau kebutuhan vital dan non-vital; etika atau nilai interinsik tidak hanya berlaku pada manusia tetapi juga dimiliki oleh non-manusia; berkomitmen untuk menciptakan perubahan ‘hijau’ di masa depan, melalui penciptaan dan promosi alternatif gaya hidup, serta menciptakan kekuasaan yang berkesadaran lingkungan.³⁷

Perbedaan mendasar antara konsep *thinking green (environmentalism)* dengan *green though* terletak pada cara memandang alam. *Thinking green* tidak bisa dilepaskan dengan *environmentalism* yang mengintegrasikan lingkungan hidup atau non-manusia ke dalam ideologi (kepentingan) yang berpusat pada manusia (*anthropocentric*), sehingga konsep ini mencari celah kaidah-kaidah yang cocok untuk memaklumi segala bentuk kehendak aktivitas manusia terhadap alam. Sedangkan *Green though*, berkaitan dengan ekologisme, sebuah

³⁷ *Ibid.*, hlm. 227–245.

ideologi ekosentris, yang tidak mencari celah untuk menempatkan kepentingan manusia di atas alam, tetapi menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan terhadap semua spesies di alam.

Green Political Theory/GPT (Teori Politik Hijau)

Eckersley melihat politik hijau merupakan sebuah upaya praktis untuk mengimplementasikan konsep *green though*, dengan tujuan menguatkan narasi ekosentrisme di dalam wilayah ekonomi-politik.³⁸ Kaidah-kaidah dasar dari politik hijau dengan tegas mengucapkan bahwa, prinsip-prinsip nilai tidak hanya berlaku di dalam lingkaran manusia tetapi juga dimiliki secara interinsik oleh makhluk non-manusia. Hal yang sama juga dilakukan oleh Goodin, mendudukkan prinsip-prinsip etik ke dalam inti politik hijau, dan tesis utamanya mengucapkan bahwa, segala sesuatu dan peristiwa terbentuk melalui proses alamiah, bukan diciptakan oleh manusia secara tunggal.³⁹ Pada posisi ini dapat dipahami bahwa, politik hijau yang tumbuh di dalam proses berpikir *green though*, meyakini bahwa ada hubungan yang signifikan antara perilaku manusia dengan kerusakan yang terjadi di alam.

Oleh sebab itu politik hijau menawarkan suatu cara pandang yang holistik tentang kelangsungan hidup semua makhluk hidup.

³⁸ Robyn Eckersley, *Environmentalism and Political Theory: Toward an Ecocentric Approach* (New York, NY: SUNY Press, 1992), 49.

³⁹ Robert E. Goodin, *Green Political Theory* (Oxford: John Wiley & Sons, 2013), 27.

Politik hijau (*green politic*) menekankan pada urgensi moralitas, etika, dan keadilan yang diyakini berpengaruh besar terhadap keseimbangan kehidupan.⁴⁰ Prinsip-prinsip etiks ini diterjemahkan ke dalam prinsip dasar *green politic*: *pertama, biospherical agalitarianism-in principle* yakni, keyakinan terhadap kesamaan makhluk hidup (manusia-nonmansua) memiliki hak dan kesamaan martabat; *ke dua, non-anthropocentrism*, yakni prinsip yang menyatakan bahwa manusia adalah bagian murni dari alam, tidak terpisah atau bahkan berada di atas alam yang berarti manusia bukan penguasa atas alam; *ke tiga, self realization* dalam terminologi Naes hal ini dipahami sebagai bentuk keniscayaan manusia merealisasikan dirinya dengan cara mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya; *ke empat, survival of the fittest*, yakni kenyataan bahwa manusia memiliki kemampuan untuk hidup bersama dalam suatu relasi yang seimbang dengan alam. *Terakhir*, prinsip *live and let live*, pengakuan terhadap keanekaragaman kehidupan.⁴¹

Berangkat dari prinsip-prinsip politik hijau ini, dalam upaya melakukan pengembangan ke dalam gerakan hijau, yang penting untuk dilakukan adalah, memupuk kesadaran ekologis dengan mengubah cara pandang dan hubungan dengan alam, dengan menekankan prinsip kesatuan integratif-interkoneksi dari semua bentuk kehidupan di alam semesta ini.⁴² Pada posisi

⁴⁰ Yusran and Afri Asnelly, “Kajian Green Politics Theory Dalam Upaya Menangani Krisis Ekologi Laut Indonesia Terkait Aktifitas Illegal Fishing”, *Indonesian Journal of International Relations* 1, No. 2 (2017): 38, dalam <https://doi.org/10.32787/ijir.v1i2.29> (diakses pada 05 Agustus, 2020).

⁴¹ John Barry, “Green Political Theory” (Forthcoming in Geoghegan, V. and Wilford, R., London: Political Ideologies, 2014), 2.

⁴² Pablo Solon, “The Rights of Mother Earth”, in *The Climate Crisis* (New York, NY: Wits University Press, n.d.), 107, dalam <http://www.jstor.com/stable/10.18772/22018020541.10>.

ini Naes mengatakan bahwa, konsep dan pradigma pembangunan secara implisit mematahkan antara posisi manusia dan alam secara tidak sejajar, di mana alam diletakkan sebagai objek pembangunan oleh manusia, untuk memenuhi kebutuhan ekonomi yang terus bertumbuh semakin besar dari waktu ke waktu.⁴³ Pradigma ini menjelaskan tentang desakan atau tuntutan untuk menghentikan kebijakan ekonomi politik yang diorientasikan pada pertumbuhan ekonomi, serta gaya hidup tinggi dan konsumtif. Upaya-upaya ini dapat dilakukan melalui pengembangan potensi daerah dalam suatu negara, dengan mengedepankan pengelolaan terhadap sumber daya alam.

Respon politik terhadap isu-isu lingkungan menjadi salah satu penentu yang berpengaruh terhadap kemampuan suatu negara dalam menjawab masalah lingkungan hidup. Liftin menyebutkan bahwa, sikap politik terhadap wacana lingkungan hidup berpengaruh terhadap kemampuan negara di dalam merespon masalah lingkungan hidup, misalnya dengan memproduksi kebijakan yang berkeadilan ekologis, atau membentuk institusi lingkungan oleh negara.⁴⁴ Respon ini bersifat konsekuensional karena, asumsi yang berlaku adalah ketika sumber daya semakin menipis maka negara akan semakin tidak stabil, dan pada perjalannya akan memicu ketegangan antara pemerintah dan *civil society*. Dalam asumsi ini, mengandung dua kritik mendasar: *pertama*, pada satu sisi negara sebagai lembaga besar yang memiliki otoritas dan kekuasaan cenderung tidak memperhatikan masalah lingkungan hidup di dalam memproduksi suatu kebijakan; *ke dua*, negara

⁴³ Arne Naess, *Ecology, Community and Lifestyle: Outline of an Ecosophy* (Cambridge University Press, 1990).

⁴⁴ Karen Litfin and Professor Karen T. Litfin, *The Greening of Sovereignty in World Politics* (London: MIT Press, 1998), 4.

dituntut untuk menunjukkan peran aktif dan optimal dalam mendistribusikan sumber daya alam atau sering disebut sebagai *desentralisasi power* untuk menegosiasikan soal-soal lingkungan sampai di level regional ataupun global.

Pada wilayah ini, politik hijau secara eksplisit membangun kritik mendasar terhadap mapannya modernisasi yang secara terselip menargetkan alam sebagai dasar pembangunan ekonomi.⁴⁵ Suyanto melihat modernisasi dan industrialisasi sejajar yakni, suatu proses kerjasama antara manusia untuk menguasai alam.⁴⁶ Sementara Rustow melihat modernisasi dan proses industrialisasi yang tercipta di dalam jaringan global, menjadi sebuah arena dunia yang mengisyaratkan kebebasan dan dominasi melalui langkah-langkah politik, ekonomi, dan budaya.⁴⁷ Dalam konteks ini, modernisasi tampak sangat dekat dan terkait dengan *development* atau pembangunan. Sebagai contoh misalnya, efisiensi produksi dan peningkatan profit dengan menggunakan teknologi dan ilmu pengetahuan, dan mendistribusikannya ke dalam batas-batas administratif berbagai negara, merupakan sebuah perwujudan industrialisasi yang tidak jarang menciptakan konflik sosial karena cenderung mengorbankan hak rakyat kecil, seperti penyerobotan atas tanah rakyat demi kepentingan produksi industri pada satu sisi, dan

⁴⁵ John Barry, “Towards a Green Republicanism: Constitutionalism, Political Economy, and the Green State,” *The Good Society* 17, No. 2 (2008): 3–11, dalam <https://doi.org/10.1353/gso.0.0040> (diakses pada 07 November, 2021).

⁴⁶ Dr Bagong Suyanto, *Sosiologi Ekonomi: Kapitalisme dan Konsumsi di Era Masyarakat Post-Modernisme* (Prenada Media, 2014), 31.

⁴⁷ Dankwart A. Rustow and Salvator Attanasio, *Freedom and Domination: A Historical Critique of Civilization* (USA: Princeton University Press, 2014), 37–94.

mengakibatkan kerusakan lingkungan dan kemiskinan pada sisi yang sama, sekaligus memicu terhadap turunnya kualitas hidup.⁴⁸

Persoalan ini telah melilit negara-negara Selatan, khususnya Indonesia. Kepentingan kekuasaan negara yang berkolaborasi dengan jaringan oligarki, menempatkan pembangunan sebagai sumber legalitas untuk melakukan akuisisi terhadap hak-hak rakyat, melalui intimidasi keamanan, mimpi kesejahteraan dan lain sebagainya. Langkah-langkah seperti ini, lazim terjadi di Indonesia sejak Orde Baru mulai mengembangkan semangat pembangunanismenya hingga pasca Reformasi, pemerintah melakukan upaya dan tindakan-tindakan yang diatasnamakan pembangunan, tanpa ditopang oleh sistem kontrol yang kuat dari masyarakat.⁴⁹ Dalam konteks ini maka, modernisasi tidak bisa dipungkiri cendrung melahirkan otoriterisme dan hegemoni atas masyarakat, maka oleh sebab itu, harus diimbangi oleh sistem kontrol dari dimensi *civil society*.

Pemerintah Orde Baru menekankan semangat pembangunan sebagai upaya untuk melakukan stabilitas politik dan integrasi nasional, untuk memastikan legitimasi pemerintah ke dalam semua bentuk kebijakan, termasuk ke dalam kebijakan deforestasi kala itu.⁵⁰ Pemerintah Orde Baru melalui ideologi pembangunannya, mengekspresikan secara koheren rencana

⁴⁸ Chriswardani Suryawati, “Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional”, *JMPK* 8, No. 3 (2005): 122–126 dalam <https://journal.ugm.ac.id/jmpk/article/viewFile/2927/2646> (diakses pada 08 November, 2021).

⁴⁹ M. S. Drs. Ec.Sihab Ridwan, “Bumi, Lingkungan, Dan Peradaban”, *JADE17: Jurnal Doktor Ekonomi* 1, No. 1 (October 16, 2016): 117–20, dalam <http://jurnal.unTAG-sby.ac.id/index.php/JADE17/article/view/801> (diakses pada 08 November, 2021).

⁵⁰ Agus Maladi Irianto, “Integrasi Nasional Sebagai Penangkal Etnosentrisme Di Indonesia”, dalam *HUMANIKA* 18, No. 2 (July 3, 2013): 4–5, <https://doi.org/10.14710/humanika.18.2> (diakses pada 08 November, 2021).

pembangunan dalam periode lima tahun-an dengan didukung oleh sistem kontrol birokrasi yang ketat, melalui strategi dan konsep pembangunan ala Barat yakni, didasarkan pada keyakinan terhadap pengarusutamaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam upaya mengorganisasikan alam untuk tujuan hidup yang lebih sejahtera.⁵¹ Pendekatan ini menempatkan alam sebagai objek eksploitasi dengan meyakini bahwa, melalui ilmu pengetahuan dan teknologi, kerusakan alam dapat direjuvinasi dengan baik. Asumsi politik Orde Baru menggambarkan dengan jelas asumsi dasar tentang lingkungan bahwa, hanya utilitas yang membenarkan segala sesuatu bagi masyarakat industri. Kebijakan Orde Baru secara eksplisit melegitimasi terhadap segala bentuk promosi proses industrialisasi, dan bahkan cenderung terlepas dari konsekuensi politik atau bahkan situasi sosial bangsa Indonesia, dengan menempatkan industrialisasi sejajar atau sama dengan modernisasi, dengan kemajuan, dengan kehidupan yang lebih baik dan lebih sehat untuk semua.

Narasi historis ekonomi politik bangsa Indonesia, menyajikan sebuah fakta kekuasaan bergantung terhadap komoditas-komoditas yang dikeruk dari kekayaan alam, atau boleh disebut sebagai rezim ekstraktif dari sejak rezim Orde Baru, Reformasi, hingga pasca Reformasi hari ini. Rezim otoritarianisme Soeharto (Orba) dari tahun 1965 sampai 1998, mengembangkan sekaligus menggambarkan rezim ekstraktif, yang digembar-gemborkan sebagai bentuk keberhasilan

⁵¹ Dauvergne, “The Politics...”, hlm. 507–510.

manufaktur oleh sarjana-sarjana neoliberal asuhan Orde Baru.⁵² Akan tetapi, ‘obralan’ memukau ini terbantahkan oleh fakta ketergantungan yang berkelanjutan pada ekspor berbasis sumber daya alam hingga rezim kuasa selanjutnya. Gallert mengisahkan, Indonesia telah bergantung pada banyak komoditas sejak masa kolonial, pendapatan yang tersedia bagi para pemimpin Indonesia melalui kekayaan sumber daya alam seperti minyak, gas, mineral, tambang, log dan lain sebagainya yang penting bagi pembangunan Indonesia.⁵³ Pola pemanfaatan sumber daya ini berpengaruh terhadap pola akumulasi domestik, sekaligus memperkokoh jangkar politik dan kekuasaan Soeharto selama 30 tahun. Pemerintah Indonesia dari waktu ke waktu, tetap terpukau dan tidak beranjak dari ideologi ‘pembangunan’, meskipun pada kenyataannya konsep pembangunan telah banyak dikritik dan mulai ditinggalkan sejak dekade 20-an karena sangat problematik, alih-alih menciptakan kesejahteraan konsep pembangunan justru menjadi kolonialisasi gaya baru dengan mengedepankan *western centric*, menjunjung validasi sains dan teknologi yang tidak pro-lingkungan.⁵⁴ Kekuasaan pasca-Soeharto di Indonesia terus meletakkan konsep pembangunan sebagai jantung utama yang diyakini dapat menggelar jalan mulus bagi kesejahteraan bangsa, yang nyatanya sampai hari ini, tidak banyak yang berubah dari bangsa ini.

⁵² Budi Rajab, “Negara Orde Baru: Berdiri Di Atas Sistem Ekonomi Dan Politik Yang Rapuh”, *Jurnal Sosiohumaniora* 6, No. 3 (November 2004): 183 dalam jurnal.unpad.ac.id/sosiohumaniora/article/view/5528/2890 (diakses pada 08 November, 2021).

⁵³ Paul K. Gellert, “Extractive Regimes: Toward a Better Understanding of Indonesian Development”, *Rural Sociology* 75, No. 1 (2010): 31–32, dalam <https://doi.org/10.1111/j.1549-0831.2009.00001.x> (diakses pada 23 Juni, 2021).

⁵⁴ Dewi Setianingsih, “Rezim Pembangunan Internasional: Dari Diskursus Hegemonik Hingga Kepengaturan Politik”, *Review of International Relations* 3, No. 1 (August 1, 2021): 29, dalam <https://doi.org/10.24252/rir.v3i1.21975> (diakses pada 08 November, 2021).

Dalam terminologi ekonomi-politik, seringkali narasi tentang kekuasaan dan ekologi dibentuk berdasarkan sejarah eksplorasi pemerintah terhadap alam demi kepentingan negara dan korporasi nasional dan transnasional. Oleh karena itu tidak jarang, lingkungan diyakini sebagai aspek fundamental relasi antara Utara-Selatan, yang mengisahkan hubungan kompleks yang berdampak pada kesenjangan dan kemiskinan di balik kehancuran ekologi.⁵⁵ Dampak signifikan krisis ekologi mendera masyarakat perdesaan yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih rendah dan bergantung pada hasil pertanian. Alston mengatakan bahwa, perdesaan memiliki kecendrungan yang lebih tinggi untuk terkena dampak perubahan iklim, namun lebih cendrung diabaikan oleh pemerintah dalam segala bentuk kebijakan, sedangkan ketidakpastian seputar produksi pertanian akibat perubahan iklim memiliki implikasi yang mendalam bagi masyarakat perdesaan.⁵⁶

Pola kebijakan seperti ini, merupakan sebuah fakta ideologi neoliberal beroperasi sebagai jantung ekonomi dan politik pada suatu negara. Secara umum, pasar diistimewakan, dan keuntungan ekonomi atas dasar pertumbuhan kapitalis, dipolarisasi sebagai strategi yang diyakini dapat menciptakan stabilitas sosial dengan pola intervensi negara atau pemerintah yang sangat kecil.⁵⁷ Hal ini pada gilirannya, menyebabkan berkurangnya dukungan

⁵⁵ Rani, "Perspektif Green...", hlm. 872.

⁵⁶ Margaret Alston, "Social Work and Environmental Advocacy", in *Community Practice and Social Development in Social Work*, ed. Sarah Todd and Julie Drolet (Singapore: Springer Singapore, 2020), 9–10, dalam https://doi.org/10.1007/978-981-13-1542-8_9-1 (diakses pada 24 Maret, 2020).

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 12.

kesejahteraan dan hak masyarakat untuk mendapatkan kesejahteraan menjadi tersumbat samasekali. Sistem neolioberal sebagai ideologi politik dan ekonomi yang paling kuat, setidaknya sampai saat ini, mengangkangi seluruh kesempatan masyarakat kecil perdesaan untuk tumbuh berkembang, dengan memotong semua sumber daya yang dimilikinya. Neoliberalisme yang berjalan melalui metode berbasis pasar dengan menghapuskan peran negara dari strategi industri, menjeleskan sebuah kumpulan kompleks dari komitmen ideologis, ideologi dan representasi diskursif, yang disebarluaskan oleh aliansi kelas yang sangat spesifik, diorganisir pada berbagai skala geografis, atau cocok untuk disebut sebagai tata kelola ekonomi globalis dengan menekankan efisiensi pasar pada sistem proyek pembangunan sebuah bangsa.⁵⁸ Sistem ini telah menciptakan kesenjangan multidimensional di dalam bangsa yang sedang berkembang seperti Indonesia, perbedaan sumberdaya antara petani dengan kapitalis adalah variabel utama bagaimana kesenjangan antar kelas semakin melebar dalam sistem ekonomi neoliberalisme. Ekonomi dan politik yang ditopang oleh neoliberalisme mendorong negara untuk terus melakukan pengeringan atas kekayaan sumber daya alam seperti, penambangan dan penebangan hutan, terus berlanjut semakin massif untuk memenuhi kebutuhan domestik dan negara maju terhadap komoditas di dalam suatu negara.⁵⁹

⁵⁸ Paul K. Gellert, “The Shifting Natures of ‘Development’: Growth, Crisis, and Recovery in Indonesia’s Forests”, *World Development* 33, No. 8 (August 1, 2005): 1346–47, dalam <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2005.03.004> (diakses pada 24 Juni, 2021).

⁵⁹ Cornelis Lay, “Nilai Strategis Isu Lingkungan Dalam Politik Indonesia”, *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 11, No. 2 (2007): 153–154, dalam <https://doi.org/10.22146/jsp.10994> (diakses pada 05 Agustus, 2020).

Pola ini terus memberikan dampak negatif bagi masyarakat kecil, khususnya bagi petani dan nelayan, karena aktivitas industrial yang terus didasarkan pada komoditas alam Indonesia, menggiring perubahan iklim yang ekstrim dan mengganggu terhadap mata pencaharian utama masyarakat perdesaan yang notabene adalah petani.

Pada tahap ini kemudian, pesantren sebagai lembaga episentrum yang mengelola pikiran besar Islam yang megah, harus didorong untuk mengimplementasikan nilai-nilai teologis ke dalam semua persoalan sosial yang berkembang. Prinsip-prinsip agama Islam, khususnya yang berbicara tentang hukum lingkungan, yang memuat nilai-nilai kesetaraan, keadilan, dan kesejahteraan, harus dapat diintegrasikan ke dalam gerakan-gerakan nyata oleh pesantren. Langkah-langkah semacam ini, menuntutkan prinsip-prinsip pesantren sebagai lembaga *da'wah bi al agwal* yang diintegrasikan ke dalam cita-cita *da'wah bi al hal*, sekaligus dapat menguatkan kesadaran pesantren untuk melakukan transformasi baru di dalam menyebarkan ajaran Islam, dengan memposisikan diri sebagai lembaga inklusif, yang dapat menjawab segala bentuk keresahan dan persoalan di lingkungannya seperti, masalah sosial, ekonomi, politik, budaya, dan ekologi.⁶⁰

Eksistensi pesantren menjadi entitas unik yang memperkaya diskursus ekologi di Indonesia. Keberadaan pesantren sebagai lembaga pendidikan multidisiplin, menempatkan tesis-tesis ekologi berintegrasi secara utuh dengan prinsip-prinsip keagamaan yang disebut

⁶⁰ Khitam, "Kontekstualisasi Teologi...", hlm. 145.

sebagai eko-pesantren.⁶¹ Pendekatan keagamaan, dalam hal ini adalah prinsi-prinsip hukum Islam, untuk mencari bentuk paling shohih dalam upaya penanggulangan problem lingkungan merupakan suatu hal yang wajar ketika pendekatan politik dan hukum tidak berjalan mulus dan signifikan dalam menantang degradasi lingkungan. Gerakan-gerakan keagamaan seperti Mangunjaya sebutkan, menjadi upaya penyadaran terhadap pengelolaan sumber daya alam dengan menyodorkan ajaran-ajaran agama sebagai wahana untuk mengelola kesadaran masyarakat terhadap lingkungan, di mana pesantren memiliki atribut utama untuk melakukan gerakan itu.⁶² Pada posisi ini, pesantren sebagai lembaga tradisional yang terus berkembang di Indonesia, membuktikan diri bahwa tesis-tesis romantic yang menyebutkan pesantren sebagai lembaga multidisiplin dan inklusif, terbuka untuk mengintegrasikan ajaran agama Islam dengan isu-isu lingkungan yang selama ini lebih cendrung didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan umum.

Beberapa pesantren telah memulai langkah-langkah nyata dalam upaya merespon degradasi lingkungan yang terus memburuk, menggunakan prinsip-prinsip ajaran Islam yang diintegrasikan ke dalam persoalan lingkungan di sekitar pesantren. Gade dalam hal ini, memotret beberapa pesantren di Indonesia salah satunya adalah pesantren Al-Ittifaq di Jawa Barat atau lebih populer disebut pesantren *tarekat sayuriyya* (berkonotasi pada sayuran),

⁶¹ Fachruddin Majeri Mangunjaya, *Ekopesantren: Bagaimana Merancang Pesantren Ramah Lingkungan?* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), 120.

⁶² *Ibid.*, hlm. 124.

karena memodifikasi pesantren menjadi lembaga ‘hijau’ dengan menanam segala macam jenis sayuran untuk konsumsi para santri dan masyarakat sekitar pesantren.⁶³ Gade tidak berhenti di sini, penelitiannya yang lain mengangkat isu yang nyaris sama yakni, posisi pesantren dalam mengorganisasikan semangat dan dedikasi untuk sadar lingkungan, menunjukkan bahwa, pemuka pesantren (kiai) adalah pesona yang kharismatik dan memiliki potensi untuk melakukan perubahan pemahaman masyarakat terhadap lingkunganisme melalui dakwah dan tradisi-tradisi keislaman seperti sholawat dan lain sebagainya yang dapat dipadukan dengan diskursus dan gerakan lingkungan.⁶⁴ Gerakan kiai dan pesantren dalam mengawal lingkungan yang lestari, telah terbukti banyak membangun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya mengelola lingkungan dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa, kerjasama antara sains dan agama dalam merespon konservasi dan lingkungan, merupakan upaya tepat di tengah komitmen politik dan kebijakan tidak berjalan signifikan dalam merespon isu-isu degradasi lingkungan hidup. Maka pesantren, melalui konsep ekopesantren yang berkembang di Indonesia, memungkinkan narasi keagamaan yang berkaitan dengan lingkungan seperti konsep *figh al biah*, yang menawarkan solusi Islam dalam persoalan krisis lingkungan hidup,⁶⁵ dapat diletakkan sebagai diskursus global, sejajar dengan pandangan baru seperti

⁶³ Gade, “Islamic Law...”, hlm. 180.

⁶⁴ Anna M. Gade, “Tradition and Sentiment in Indonesian Environmental Islam”, *Worldviews: Global Religions, Culture, and Ecology* 16, No. 3 (January 1, 2012): 263–71, dalam <https://doi.org/10.1163/15685357-01603005> (diakses pada 22 Desember, 2020).

⁶⁵ Muhammad Harfin Zuhdi, “Rekonstruksi Fiqh Al-bi’ah Berbasis Maslahah: Solusi Islam terhadap Krisis Lingkungan”, *Istinbath: Jurnal Hukum Islam IAIN Mataram* 14, No. 1 (2015): 41836 dalam

anthropocene yang menjadi perhatian dunia akademik akhir-akhir ini. Pesantren pada posisi ini, selain dapat mendorong secara konsisten gerakan hijau, secara tidak langsung juga mendidik pemerintah untuk memikirkan kembali strategi pembangunan yang berorientasi pasar ala neoliberalisme, seperti yang dikatakan oleh Nikolas dkk bahwa, negara pada dasarnya merupakan orkestrator kesejahteraan masyarakat, yang harus mengambil peran lebih banyak dalam upaya strategis pembangunan berbasis kesejahteraan sosial.⁶⁶

F. Metode Penelitian

Waktu yang diperlukan dalam menyusun tesis ini kurang lebih 14 bulan terhitung sejak Agustus 2020 sampai November 2021. Penulis mengumpulkan secara *daring* dan *luring* karena adanya peraturan pembatasan sosial Covid-19. Pengumpulan data *offline* dilakukan melalui observasi-partisipatif, seperti mengikuti diskusi kelompok-kelompok keagamaan beberapa kiai seperti FORKIM pada Januari 2021, dan Forum Sumenep Hijau pada April 2021, melakukan observasi terhadap pengelolaan limbah tambak udang di pesisir timur daya Sumenep (Batang-Batang, Gapura, Dungkek) pada Januari 2021. Selain itu, penggalian data juga dilakukan melalui wawancara kepada para inisiator gerakan hijau dan pihak-pihak terkait lainnya di Sumenep, seperti: kiai Jurjiz Muzammil, kiai Moh. Naqib Hasan, kiai Dardiri Zubair, Darul Hasyim Fath, Hosaini Adhim, Zaifuddin, Moh. Ruysdi, Ridhafi, Khalil,

<https://www.neliti.com/publications/41836/rekonstruksi-fiqh-al-b%C3%A3ah-berbasis-maslahah-solusi-islam-terhadap-krisis-lingkun> (diakses pada 05 Agustus, 2020).

⁶⁶ Nikolas Rose, Pat O’Malley, and Mariana Valverde, “Governmentality” (The University of Sydney, 2009), 12.

Maswan, Iskandar Dzulkarnain, kiai Qumri dan Lora Muzanni. Melalui tokoh-tokoh ini, data-data terkait permasalahan lingkungan di Sumenep, berhasil terkumpul dengan maksimal. Selain itu, penulis berusaha mengkonfirmasi persoalan lingkungan kepada Bupati terpilih Sumenep 2020, Ahmad Fauzi, melalui mekanisme administratif yang berlaku di pemerintahan Kabupaten Sumenep, akan tetapi sampai draft penelitian ini selesai, pihak Bupati Sumenep tidak memberikan jadwal untuk bertemu dengan alasan tidak dapat menerima tamu karena kondisi kesehatan yang terganggu.

Pengumpulan data secara *online*, peneliti lakukan melalui observasi terhadap kanal berita atau media online lokal Sumenep yang menyajikan tentang persoalan lingkungan hidup di Sumenep, seperti Koran Madura, Radar Madura dan lain sebagainya. Selain mengumpulkan data melalui berita online, penulis juga melakukan observasi terhadap diskusi atau webinar terkait problematika lingkungan salah satunya adalah, webinar yang dilaksanakan oleh PS2PM Universitas Trunojoyo Madura: *Qouvadis Madurese Studies: Menimbang Arah, Peluang dan Tantangan Kajian Madura*, Webinar Series 1 22 September 2021. Selain melalui dua metode ini, penulis juga sering mendapatkan data dari buku dan jurnal. Melalui beberapa literatur itu, penulis mendapatkan beberapa data yang menguatkan terhadap hasil penelitian ini.

G. Sitematika Pembahasan

Tesis ini tersusun menjadi lima bab. Bab pertama merupakan pendahuluan. Pada bab ini berisi tujuh sub bab pembahasan antara lain, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan signifikansi penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan yang terakhir adalah sistematika pembahasan. Pada bab ini, penulis mengemukakan argument dasar dan kontribusi penelitian, dan kebaharuan di dalam penelitian.

Bab dua dalam penelitian ini, menguraikan bagaimana narasi ekologi dari berbagai pendekatan perspektif di Indonesia. Mulai dari perspektif filosofis, perspektif agama hingga perspektif ekonomi politik. Dalam bab ini, argumen dasar yang dikemukakan oleh peneliti adalah fakta bahwa, politik lingkungan dari sejak Orde Baru melalui semangat pembangunanisme rezim Soeharto ini, hingga pada pasca Reformasi di bawah beberapa kekuasaan, pola politik lingkungan tidak banyak berubah, dengan tetap mengedepankan pandangan yang mengobjekkan lingkungan hidup. Sehingga persoalan lingkungan terus mengarah pada situasi yang mengkhawatirkan. Penutup dalam bab ini, peneliti menyajikan bagaimana rezim Jokowi dengan devolopmentalisme gaya barunya, telah menggambarkan komitmen yang tidak sungguh-sungguh mengedepankan kesadaran terhadap lingkungan.

Bab ke tiga dalam penelitian ini, menjelaskan tentang bagaimana semua pihak di Sumenep, tidak terkecuali kiai dan seluruh otoritas keagamaan tidak kuasa membendung kepentingan pasar atau industrialisasi, yang mengedepankan eksplorasi terhadap alam. walaupun kiai melalui gerakan hijau berusaha melakukan gerakan *civil society* dengan

berusaha menyuarakan urgensi kesadaran lingkungan lestari, nyatanya tidak mampu mengubah apapun. Alih-alih mengubah kehendak kekuasaan untuk menghentikan eksplorasi terhadap alam, kiai dan gerakan rakyat justru banyak terjebak ke dalam kepentingan sektoral, sehingga gerakan hijau di Sumenep tidak terorganisasi dengan baik dan kuat. Bab ini mengemukakan bahwa, kekuasaan dan oligarki di tingkat lokal Sumenep, menjadi kekuatan adidaya yang tidak bisa dibendung oleh semua pihak manapun, termasuk oleh kiai, karena oligarki di Sumenep bersenyawa dengan elit-elit lokal termasuk kiai yang menjadi figur masyarakat.

Bab ke empat menjelaskan tentang bagaimana masyarakat religius seperti Sumenep berkontribusi terhadap wacana antroposen. Pembahasan di mulai dengan memaparkan eksistensi kiai dan pesantren sebagai aktor dan lembaga yang mengelola pikiran besar Islam sekaligus pikiran masyarakat. Pesantren dan kiai dalam bab ini, tidak mampu mensinergikan antara literatur keislaman yang berbicara tentang lingkungan, dengan wacana global tentang ekologi, sehingga pengetahuan masyarakat tentang apa itu krisis ekologi tidak bertumbuh, karena ketidakhadiran kiai dan pesantren dalam upaya membangun diskursus tentang ekologi. Oleh karenanya, bab ke empat ini ditutup dengan kesimpulan bahwa, masyarakat religius seperti Sumenep, tidak memiliki kontribusi besar terhadap wacana antroposen, meskipun kiai dan pesantren memiliki atribut yang megah untuk membangun diskursus ini di tengah masyarakat.

Bab terakhir dalam penelitian ini adalah, berisi tentang kesimpulan secara keseluruhan dari bab-bab sebelumnya. Dalam bab ini, peneliti menjawab rumusan masalah yang telah penulis sampaikan di dalam bab pertama. Selain itu, peneliti juga memberikan saran untuk peneliti selanjutnya, dan kepada pihak-pihak terkait di tingkat lokal Sumenep atau pemerintah pusat secara umum untuk mengambil langkah-langkah baru dalam mengkonstruksi kebijakan terkait lingkungan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Tesis ini menunjukkan bahwa, krisis ekologi bukanlah suatu hal yang baru di Indonesia, dan pola-pola eksploitasi terhadap lingkungan cenderung memperlihatkan ritme yang tidak jauh berbeda dari waktu ke waktu, di bawah rezim kuasa yang berbeda-berbeda. Kisruh lingkungan hidup yang terjadi di Sumenep dalam satu dekade terakhir, mewakili fakta kepentingan ekonomi dan politik di bawah ideologi neoliberalisme, merupakan kekuatan besar yang tidak bisa dihadapi oleh semua pihak, bahkan oleh otoritas jaringan keagamaan seperti pesantren dan kiai. Problem degradasi lingkungan sejak Orde Baru melalui semangat pembangunanismenya, hingga sampai detik ini ketika semangat demokrasi menyala dari setiap sudut bangsa, narasi ekologi masih menempatkan alam sebagai objek pembangunan. Persepsi ini bahkan berlaku di dalam lingkaran keagamaan Islam pada praktiknya. Suatu gejala yang menggambarkan bahwa, masyarakat secara umum, khususnya ulama dan kiai yang memiliki legitimasi terhadap pengetahuan keagamaan, tidak memiliki *stand of crisis* yang memadai, untuk mengimplementasikan ajaran Islam tentang etika relasi manusia dan alam yang integratif di dalam dalil-dalil agama. Oleh karena itu, meskipun wacana lingkungan hidup berada di dalam ruang lingkup jaringan keagamaan seperti di Sumenep, pada prinsipnya tidak memberikan kontribusi yang signifikan terhadap terbentuknya pemahaman masyarakat tentang kesadaran lingkunganisme yang lestari.

Degradasi lingkungan di Sumenep dalam hasil telaah tesis ini menunjukkan, berjalan ke arah yang semakin mengkhawatirkan. Selain karena krisis literasi semua elemen masyarakat tentang wacana lingkungan, gerakan kiai dan pesantren dalam mengawal isu-isu

lingkungan di Sumenep tidak sepenuhnya untuk membangun kesadaran masyarakat terhadap lingkungan secara lebih luas, akan tetapi lebih berorientasi pada kepentingan politik sektoral. Hal ini dapat dibuktikan dengan komitmen kiai dan pesantren di dalam menyoal isu-isu lingkungan di Sumenep seperti tidak adanya *bathsul masail* tentang krisis ekologi, akan tetapi lebih fokus pada penguatan partisipasi massa di dalam mendukung gerakan lingkungan. Perhatian terhadap isu lingkungan oleh kiai dan pesantren, tidak seperti gerakan-gerakan lingkungan yang ditulis oleh Anna Gade, kiai dan pesantren tidak menghubungkannya dalam *framework* besar mengenai SDG's misalnya, akan tetapi hanya berlatar pada kekalahan kelompok politik tertentu di dalam kontestasi politik lokal Sumenep.

tergerusnya gerbong politik PKB dan afiliasinya, terutama di pesantren-pesantren besar seperti Annuqayah, yang terpecah menjadi dua kekuatan: *pertama* kelompok yang terdiri dari para kiai yang mendukung putra pesantren, kiai Muhammad Ali Fikri, di bawah bendera PKB; *ke dua*, adalah kelompok kiai yang menjadi partisan politik Ahmad Fauzi dan PDIP. Oleh karena itu, rivalitas politik ini menjadi sangat alot, bahkan terjaga hingga pasca Pilkada 2020. Selaras kemudian, Isu tentang fosfat sebagai bentuk implementasi revisi atas Perda RTRW 2013-2033 yang diinisiasi oleh KH. Busyro Karim dari PKB sewaktu memimpin Sumenep selama dua periode, pada tahun 2018 telah menyelundupkan hasil revisi yang tidak transparan, dan pada akhirnya menjadi petaka bagi Ahmad Fauzi bahkan di semester pertama ia memimpin Sumenep. Revisi atas titik penambangan fosfat yang coba dijalankan oleh Fauzi di awal kepemimpinannya, mendapat reaksi keras dari kalangan kiai dan pesantren. Bahkan ada indikasi untuk menghakimi Fauzi karena tidak memiliki komitmen untuk menjaga lingkungan melalui isu fosfat. Akan tetapi, reaksi ini memperlihatkan sentimen politik atas PDI-Perjuangan oleh kiai, di mana sebelumnya di bawah KH. Busyro

dan PKB nya, yang telah menciptakan perda yang sangat permisif terhadap investor, melahirkan perjanjian-perjanjian yang tidak pro terhadap kelestarian lingkungan, seperti pengelolaan tambak udang dan limbahnya yang sangat buruk, jual beli tanah yang dibiarkan begitu saja, tidak mendapat sorotan samasekali dari kelompok kiai, bahkan cendrung ditolerir sebagai bentuk kebijakan untuk kesejahteraan masyarakat, yang nyatanya jauh dari nilai-nilai kesejahteraan itu sendiri.

Tesis ini menunjukkan bahwa, latar belakang politik lokal Sumenep, mendeskripsikan tentang rivalitas yang tidak hanya melibatkan kontestan politik *an sich*, tetapi sekaligus rivalitas antara kiai di dalam pesantren, atau rivalitas kiai antar pesantren, yang dibungkus melalui isu-isu lingkungan pasca Pilkada, tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap kesadaran semua element masyarakat terhadap lingkungan. Sehingga, kiai yang semula menjadi figur tunggal masyarakat karena citra kharismatiknya, serta ketokohan yang tumbuh dari karakter dasariahnya sebagai edukator, kini telah rusak, hancur lebur, dan membuat kiai ‘turun kelas’ karena terjebak ke dalam kontestasi politik. Fitrah kiai sebagai edukator dan pembela masyarakat, di tengah semakin gencarnya proyek pembangunan di Sumenep yang menyebabkan volume tanah semakin sempit, akuisisi tanah semakin massif oleh para investor China, membengkaknya tambak udang dengan limbah yang tidak dikelola dengan baik, membuat ekosistem di laut menjadi rusak, tidak mampu dicegah ataupun diminimalisir oleh kiai.

Krisis lingkungan hidup pada prinsipnya, menumbuhkan kesadaran yang pada akhirnya akan melahirkan gerakan sosial *civil society*. Dalam tesis ini, gerakan sosial untuk mengadvokasi lingkungan yang diinisiasi oleh kiai dan pesantren sebagai katalisator suara masyarakat kepada pemerintah terkontaminasi oleh persaingan politik yang membuat fitrah

gerakan menjadi tidak *fitrah* samasekali. Gerakan hijau kiai tampak menjadi tidak murni, sulit untuk menciptakan rasa ke-kita-an di masyarakat, karena fokus gerakan kiai tidak bertumbuh untuk menambal ketidaktahuan masyarakat tentang apa yang dimaksud dengan krisis ekologi, apa yang disebut sebagai *extreme climate change*, atau apa dampak global warming terhadap masyarakat petani dan nelayan. Isu lingkungan yang diusung oleh kiai lebih cendrung bernuansa politis, fokus pada gerakan konfrontatif dengan pemerintah, menebarkan wacana yang menempatkan penyelenggara negara di tingkat daerah sebagai *common enemy*, yang membuat wacana krisis lingkungan hanya terbatas pada kalangan elit kiai. Alhasil, wacana krisis ekologi yang tumbuh di dalam latar belakang politik sentiment dan fanatisme, melahirkan kelompok-kelompok gerakan seperti Forum Semenep Hijau, FORKIM (Forum Kiai Muda Madura), dan Fornt NU Timur Daya. Munculnya kelompok-kelompok gerakan hijau ini, menandakan bahwa gerakan sosial di Sumenep yang diinisiasi oleh kiai menjadi parsial, tidak sistematis, tidak terorganisir, dan tidak ditopang oleh ideologi yang kuat, dan pada kenyataannya, gerakan kiai melalui kelompok-kelompok gerakannya, tidak mampu mendobrak kuatnya dinding oligarki yang terususun dari identitas yang sama yakni, kiai. Oleh karena itu, kasus-kasus lingkungan hidup sejak 2016 silam menguap begitu saja. Pada titik ini kita dapat menyimpulkan bahwa, kebaikan yang tidak terorganisir pada akhirnya akan kalah pada kejahatan yang terorganisir.

Studi-studi sebelumnya tentang Sumenep, berakhir di dalam kesimpulan tentang etnisitas dan narasi kultural yang menempatkan kiai sebagai sosok sentral, yang dapat mendorong gerakan sosial masyarakat karena legitimasinya terhadap ilmu agama, pun juga dapat mengatur sikap dan tindakan manusia dengan kekuatan adikodrati alam. Akan tetapi, alih-alih dapat mencegah kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh manusia, terutama dari

ancaman kepentingan investor, tesis ini menunjukkan bahwa kiai justru terperangkap ke dalam *populisme heavy*, dan larut di dalam upaya-upaya perluasan elektoral yang jauh dari citra kharismatik kiai sebagai pengasuh masyarakat. Oleh karena itu, kemegahan ajaran Islam tentang bagaimana seharusnya manusia memandang dan menempatkan diri dengan alam, tidak bisa diinternalisasikan ke dalam wacana diskursus lingkungan hidup. Kekayaan tesis-tesis Islam di dalam persoalan etika relasional manusia dengan alam pada dasarnya, mendahului dan melampaui perspektif antroposen tentang bagaimana sistem kehidupan akan berlangsung lebih baik dengan mengintegrasikan persepsi tentang alam dan manusia. Akan tetapi, ajaran-ajaran Islam ini, tidak mampu digali sekaligus ditempatkan ke dalam wacana global sejauh ini. Selain karena krisis literasi mengenai lingkungan, kehendak untuk menumbuhkan diskursus lingkungan atau pemberdayaan masyarakat, di tengah lingkungan masyarakat religius seperti Sumenep, belum tampak terbangun dengan kuat, baik oleh kiai, kalangan elit politik, pemerintah, akademisi, ataupun di dalam kalangan aktivis. Sehingga wacana lingkungan hidup hanya menjadi wacana elitis, bukan bertumbuh sebagai sebuah diskursus yang dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap urgensi kesadaran atas lingkungan yang lestari.

B. Saran

Penulis memiliki empat saran terhadap peneliti tema terkait selanjutnya. *Pertama*, penelitian selanjutnya dapat memotret respon masyarakat akar rumput di Sumenep terhadap gerakan hijau kiai secara lebih mendalam. *Ke dua*, penelitian selanjutnya dapat mendalami bagaimana kiai melakukan langkah-langkah rekrutmen partisan gerakan, dan bagaimana mereka mengedarkan narasi ekologi dan agama di tengah para elit di Sumenep. *Ke tiga*, peneliti selanjutnya dapat melakukan langkah-langkah eksplorasi terhadap kebijakan

pemerintah tentang tata kelola sumber daya alam di Sumenep yang sangat kaya, akan tetapi tidak dapat memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat dengan persentase kemiskinan terbawah di antara kabupaten yang lain di Madura. *Terakhir*, penelitian selanjutnya dapat melakukan kajian terhadap tidak bertumbuhnya diskursus tentang lingkungan di Sumenep secara mendalam, apa latar belakang penyebabnya, sehingga tukar tambah tentang ekologi di Sumenep tidak bertumbuh dengan megah di tengah persoalan lingkungan yang semakin memburuk.

Kemudian kepada pihak-pihak terkait: *pertama*, kepada pemerintah. Pemerintah harus memikirkan kembali bahwa pada kenyataannya, ekonomi dan kesejahteraan sejauh ini hanya diinfus oleh industri ekstraktif yang akan menyempitkan pertumbuhan inovasi, dan pada gilirannya akan melahirkan kesengsaraan lebih mendalam, karena ketergantungan terhadap komoditas alam akan berkelanjutan; *ke dua*, pemerintah harus menumbuhkan *shifting paradigm* masyarakat untuk membaca masa depan dengan kondisi alam yang berubah melalui pendekatan politik hijau dan pemerintahan hijau; *ke tiga*, kepada pemuka agama atau Kiai sebagai tokoh masyarakat, proses pendidikan tentang lingkungan harus terus ditingkatkan dengan dimulai dari dalam pesantren dan di dalam kelompok-kelompok masyarakat untuk menumbuhkan pemahaman tengkang lingkungan lestari.

DAFTAR PUSTAKA

- A'la, Abd, Mukhammad Zamzami, Nur Hidayat Wakhid Udin, and Ahmad Fathan Aniq. "Islamism in Madura from Religious Symbolism to Authoritarianism." *JOURNAL OF INDONESIAN ISLAM* 12, no. 2 (2018). <https://doi.org/10.15642/JIIS.2018.12.2.159-194>.
- Abidin, Endriady Edy. "Pembangunan, Neoliberalisme Dan Kesenjangan: Belajar Dari Pengalaman Amerika Latin." *Jurnal Hubungan Internasional Interdependence* 1, no. 1 (January 16, 2019). <http://e-journals.unmul.ac.id/index.php/JHII/article/view/1724>.
- Adian, Dr Donny Gahral. *Pengantar Fenomenologi*. Jakarta: Penerbit Koekoesan, 2016.
- Alston, Margaret. "Social Work and Environmental Advocacy." In *Community Practice and Social Development in Social Work*, edited by Sarah Todd and Julie Drolet, 1–18. Singapore: Springer Singapore, 2020. https://doi.org/10.1007/978-981-13-1542-8_9-1.
- Amira, Arianti Nur. "Perbandingan Pengaturan Status Penanaman Modal Perseroan Terbuka Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing Juncto Undang-Undang No 6 Tahun 1968 Tentang Penanaman Modal Dalam Negeri Dan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal." *JLR - Jurnal Legal Reasoning* 2, no. 1 (December 31, 2019): 1–15.
- Amri, Ulil. "Konservasi Berbasis Komunitas Religi: Membedah Peran Ormas Keagamaan Dalam Upaya Melestarikan Sumber Daya Alam Di Indonesia." *Masyarakat Indonesia: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia* 28, no. 1 (2012). <http://jmi.ipsk.lipi.go.id/index.php/jmiipsk/article/view/294>.
- . "Muslim Environmentalisms: Religious and Social Foundations. By Anna Gade. New York: Columbia University Press, 2019. 323 Pp. ISBN: 9780231191043 (Cloth)." *The Journal of Asian Studies* 79, no. 2 (May 2020): 536–38. <https://doi.org/10.1017/S0021911820000625>.
- Aprianto, Tri Chandra. "Pelaksanaan Agenda Reforma Agraria Awal Masa Orde Baru (1967-1973)." *Historia* 3, no. 2 (March 24, 2021): 397–414.
- Aulia, Rihlah Nur, Izzatul Mardhiah, Ade Gunawan, and Dian Elvira Nanda Isnaini. "Contribution Of Education Culture In Pesantren In Tackling Environmental Damage In Indonesia." In *Proceeding International Conference on University and Intellectual Culture*. Jakarta: ICUIC, 2018.
- Azzarqa, Azzarqa, and Ahmad Thohari. "Epistemologi Fikih Lingkungan: Revitalisasi Konsep Masalah." *Az Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam* 5, no. 2 (December 1, 2013). <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/azzarqa/article/view/1317>.

- Baihaqi, Mohamad. "Legitimasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Kontestasi Islam Politik Mutakhir." *Politea : Jurnal Politik Islam* 2, no. 2 (November 29, 2019): 19–48. <https://doi.org/10.20414/politea.v2i2.1477>.
- Baiquni, M. "Revolusi Industri, Ledakan Penduduk Dan Masalah Lingkungan." *Jurnal Sains & Teknologi Lingkungan* 1, no. 1 (2009): 38–59. <https://doi.org/10.20885/jstl.vol1.iss1.art3>.
- Bakari, Mohamed El-Kamel. "Mapping the 'Anthropocentric-Ecocentric' Dualism in the History of American Presidency: The Good, the Bad, and the Ambivalent." *Consilience*, no. 17 (2017): 1–32.
- Barry, John. "Green Political Theory." London: Political Ideologies, 2014.
- . "Towards a Green Republicanism: Constitutionalism, Political Economy, and the Green State." *The Good Society* 17, no. 2 (2008): 3–11. <https://doi.org/10.1353/gso.0.0040>.
- Boetto, Heather. "A Transformative Eco-Social Model: Challenging Modernist Assumptions in Social Work." *The British Journal of Social Work* 47, no. 1 (January 1, 2017): 48–67. <https://doi.org/10.1093/bjsw/bcw149>.
- Bruinessen, Martin Van. *Rakyat Kecil, Islam, Dan Politik*. Yogyakarta: Gading, 2013.
- Carnegie, Michelle. "Development Prospects in Eastern Indonesia: Learning from Oelua's Diverse Economy." *Asia Pacific Viewpoint* 49, no. 3 (2008): 354–69. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8373.2008.00383.x>.
- Choiriyah, Ngismatul. "Rasionalisme Rene Descartes." *Anterior Jurnal* 13, no. 2 (2014): 237–243–237–243. <https://doi.org/10.33084/anterior.v13i2.284>.
- Chua, L., and H. Fair. "Anthropocene." *The Cambridge Encyclopedia of Anthropology*, January 8, 2019. <https://doi.org/10.29164/19anthro>.
- Clapp, Jennifer, and Peter Dauvergne. *Paths to a Green World, Second Edition: The Political Economy of the Global Environment*. London: MIT Press, 2011.
- Coates, Jhon. "From Ecology to Spirituality and Social Justice." *Currents: New Scholarship in the Human Service* 3, no. 1 (2004): 11.
- Coates, John, Mel Gray, and Tiani Hetherington. "An 'Ecospiritual' Perspective: Finally, a Place for Indigenous Approaches." *The British Journal of Social Work* 36, no. 3 (April 1, 2006): 381–99. <https://doi.org/10.1093/bjsw/bcl005>.
- Dauvergne, Peter. "The Politics of Deforestation in Indonesia." *Pacific Affairs* 66, no. 4 (1993): 497–518. <https://doi.org/10.2307/2760676>.

- Dobson, Andrew, Sherilyn MacGregor, Douglas Torgerson, and Michael Saward. “Trajectories of Green Political Theory.” *Contemporary Political Theory* 8, no. 3 (August 1, 2009): 317–50. <https://doi.org/10.1057/cpt.2009.11>.
- Dominelli, Lena. “Globalization, Contemporary Challenges and Social Work Practice.” *International Social Work* 53, no. 5 (September 2010): 599–612. <https://doi.org/10.1177/0020872810371201>.
- . *Green Social Work: From Environmental Crises to Environmental Justice*. London: Polity, 2012.
- Eckersley, Robyn. *Environmentalism and Political Theory: Toward an Ecocentric Approach*. New York, NY: SUNY Press, 1992.
- Fakih, Mansour. *Masyarakat Sipi Untuk Transformasi Sosial: Pergolakan Ideologi LSM Indonesia*. Vol. 1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Fauzi, Amelia, Andi A Prihatna, Irfan Abubakar, and Rita Pranawati. *Islam Di Ruang Publik: Politik Identitas Dan Masa Depan Demokrasi Di Indonesia*. Jakarta: CRCS, 2011.
- Gade, Anna M. “Islamic Law and the Environment in Indonesia: Fatwa and Da‘wa.” *Worldviews: Global Religions, Culture, and Ecology* 19, no. 2 (January 1, 2015): 161–83. <https://doi.org/10.1163/15685357-01902006>.
- . “Tradition and Sentiment in Indonesian Environmental Islam.” *Worldviews: Global Religions, Culture, and Ecology* 16, no. 3 (January 1, 2012): 263–85. <https://doi.org/10.1163/15685357-01603005>.
- Gellert, Paul K. “Extractive Regimes: Toward a Better Understanding of Indonesian Development.” *Rural Sociology* 75, no. 1 (2010): 28–57. <https://doi.org/10.1111/j.1549-0831.2009.00001.x>.
- . “The Shifting Natures of ‘Development’: Growth, Crisis, and Recovery in Indonesia’s Forests.” *World Development* 33, no. 8 (August 1, 2005): 1345–64. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2005.03.004>.
- Gleeson, Brendan, and Nicholas Low. *Justice, Society and Nature: An Exploration of Political Ecology*. London: Routledge, 2002.
- Goodin, Robert E. *Green Political Theory*. Oxford: John Wiley & Sons, 2013.
- Großmann, Kristina. “Gaharu King – Family Queen: Material Gendered Political Ecology of the Eaglewood Boom in Kalimantan, Indonesia.” *The Journal of Peasant Studies* 44, no. 6 (November 2, 2017): 1275–92. <https://doi.org/10.1080/03066150.2017.1341408>.

- Hadi, Dwi Wahyono, and Gayung Kasuma. "Propaganda Orde Baru 1966-1980." *Verleden* 1, no. 1 (Desember 2012). https://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-4_jurnal%20propaganda_dwiwahyonohadi.pdf.
- Hamdi, Ahmad Zainul. "Dinamika Hubungan Islam Dan Lokalitas: Perebutan Makna Keislaman Di Madura." *TEOSOFI: Jurnal Tasawuf Dan Pemikiran Islam* 8, no. 2 (December 15, 2018): 433–56. <https://doi.org/10.15642/teosofi.2018.8.2.430-454>.
- Harahap, Rabiah Z. "Etika Islam Dalam Mengelola Lingkungan Hidup." *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 1, no. 01 (March 5, 2015). <https://doi.org/10.30596/edutech.v1i01.271>.
- Hardiman, F. Budi. *Filsafat modern: dari Machiavelli sampai Nietzsche*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Hartati, Anna Yulia. "Global Environmental Regime: Di Tengah Perdebatan Paham Antroposentris Versus Ekosentris." *SPEKTRUM* 12, no. 2 (July 2, 2012). <https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/index.php/SPEKTRUM/article/view/471>.
- Hasan, Noorhaidi. *Laskar Jihad: Islam, Militancy, and the Quest for Identity in Post-New Order Indonesia*. New York, NY: SEAP Publications, 2006.
- . "Religious Diversity and Blasphemy Law: Understanding Growing Religious Conflict and Intolerance in Post-Suharto Indonesia." *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 55, no. 1 (June 26, 2017): 105–26. <https://doi.org/10.14421/ajis.2017.551.105-126>.
- . "State, Religion, and the Dynamics of Transition: Reportair of Violence Is Post-Seoharto Indonesia." In *Religious Diversity and Civil Society A Comparative Analysis*. Oxford: Bardwell Press, 2008.
- Hasyim, Syafiq. "Fatwas and Democracy: Majelis Ulama Indonesia (MUI, Indonesian Ulema Council) and Rising Conservatism in Indonesian Islam." *TRaNS: Trans - Regional and -National Studies of Southeast Asia* 8, no. 1 (2020). <https://doi.org/doi:10.1017/trn.2019.13>.
- Hefner, Robert W. "Islam, State, and Civil Society: ICMI and the Struggle for the Indonesian Middle Class." *Indonesia*, no. 56 (1993): 1–35. <https://doi.org/10.2307/3351197>.
- Hiariej, Eric. "Aksi Dan Identitas Kolektif Gerakan Islam Radikal Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 14, no. 2 (November 1, 2010): 131–68. <https://doi.org/10.22146/jsp.10934>.
- Hidayat, Herman. *Politik lingkungan: pengelolaan hutan masa Orde Baru dan reformasi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.

- Hoffman, Andrew J., and Lloyd E. Sandelands. "Getting Right with Nature: Anthropocentrism, Ecocentrism, and Theocentrism." *Organization & Environment* 18, no. 2 (June 1, 2005): 141–62. <https://doi.org/10.1177/1086026605276197>.
- Houben, Vincent J. H. "Southeast Asia and Islam." *The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science* 588, no. 1 (July 1, 2003): 149–70. <https://doi.org/10.1177/0002716203588001010>.
- Huda, Mi'rojul, and Novy Y Setia. "Good Extractive Governance : Sebuah Gagasan Untuk Kesejahteraan Masyarakat Wilayah Pertambangan Di Indonesia." *Matra Pembaruan* 1, no. 2 (2017). <http://jurnal.kemendagri.go.id/index.php/mp/article/view/411>.
- Ichwan, Moch Nur. "'Ulamā', State and Politics: Majelis Ulama Indonesia After Suharto." *Islamic Law and Society* 12, no. 1 (January 1, 2005): 45–72. <https://doi.org/10.1163/1568519053123867>.
- Ichwan, Moch. Nur, *Eko-Teologi Bencana, Aktivisme Sosial Dan Politik Kemaslahatan* (Yogyakarta: Mizan Pustaka, 2012) 19-20.
- Irianto, Agus Maladi. "Integrasi Nasional Sebagai Penangkal Etnosentrisme Di Indonesia." *HUMANIKA* 18, no. 2 (July 3, 2013). <https://doi.org/10.14710/humanika.18.2>.
- Iqbal, Imam. "Kosmologi, Sains, Dan Teknologi: Pergeseran Paradigmatik Dan Implikasinya Terhadap Studi Agama." *KALAM* 8, no. 1 (July 1, 2014): 27–42. <https://doi.org/10.24042/klm.v8i1.166>.
- Katappo, Aristides. *Jejak Perlawanan Begawan Pejuang Sumitro Djojohadikusumo*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000. http://perpusbalarjogja.kemdikbud.go.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D11049.
- Keraf, A. Sonny. *Etika lingkungan hidup*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010.
- . "Fritjof Capra Tentang Melek Ekologi Menuju Masyarakat Berkelanjutan." *Diskursus - Jurnal Filsafat Dan Teologi Stf Driyarkara* 12, no. 1 (April 22, 2013): 54–81. <https://doi.org/10.36383/diskursus.v12i1.118>.
- Khitam, Husnul. "Kontekstualisasi Teologi Sebagai Basis Gerakan Ekologi." *DINIKA : Academic Journal of Islamic Studies* 1, no. 2 (August 31, 2016): 143–64. <https://doi.org/10.22515/dinika.v1i2.62>.
- Kidner, David W. "Why 'Anthropocentrism' Is Not Anthropocentric." *Dialectical Anthropology* 38, no. 4 (December 2014). <https://www.jstor.org/stable/43895119>.

- Kopnina, Helen, Haydn Washington, Bron Taylor, and John J Piccolo. "Anthropocentrism: More than Just a Misunderstood Problem." *Journal of Agricultural and Environmental Ethics* 31, no. 1 (February 1, 2018): 109–27. <https://doi.org/10.1007/s10806-018-9711-1>.
- Laarse, Maxime C. van der. *Environmentalism in Indonesia Today Environmental Organisations, Green Communities, and Individual Sustainable Lifestyles*. Netherlands: LEIDEN UNIVERSITY, 2016.
- Lako, Andreas. "Menghijaukan Ekonomi, Bisnis & Akuntansi," 2015, 9.
- Lay, Cornelis. "Nilai Strategis Isu Lingkungan Dalam Politik Indonesia." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 11, no. 2 (2007): 153–72. <https://doi.org/10.22146/jsp.10994>.
- Lee, So Yoon. "An Urban Explanation of Jokowi's Rise: Implications for Politics and Governance in Post-Suharto Indonesia." *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, February 24, 2021, 1868103421990853. <https://doi.org/10.1177/1868103421990853>.
- Legowo, Sivfian Hendra, I. G. Krisnadi, and Hendro Sumartono. "Dinamika Politik Rezim Orde Baru Di Indonesia Studi Tentang Kegagalan Konsolidasi Politik Rezim Orde Baru Pada Tahun 1990-1996." *Publika Budaya* 1, no. 1 (September 1, 2013): 16–24.
- Li, Tania Murray. *The Will to Improve: Governmentality, Development, and the Practice of Politics*. Duke University Press, 2007.
- . *The will to improve perencanaan, kekuasaan, dan pembangunan di Indonesia*. Tangerang: Marjin Kiri, 2012.
- Litfin, Karen, and Professor Karen T. Litfin. *The Greening of Sovereignty in World Politics*. London: MIT Press, 1998.
- Lucia, Vito De. "Beyond Anthropocentrism and Ecocentrism: A Biopolitical Reading of Environmental Law." *Journal of Human Rights and the Environment* 8, no. 2 (September 1, 2017): 181–202. <https://doi.org/10.4337/jhre.2017.02.01>.
- Maarif, Samsul. *Pasang Surut Rekognisi Agama Leluhur Dalam Politik Agama Di Indonesia*. Yogyakarta: CRCS, 2018.
- Mangunjaya, Fachruddin M., and Jeanne Elizabeth McKay. "Reviving an Islamic Approach for Environmental Conservation in Indonesia." *Worldviews: Global Religions, Culture, and Ecology* 16, no. 2 (2012). <https://doi.org/10.1163/15685357-01603006>.
- Mangunjaya, Fachruddin Majeri. *Ekopesantren: Bagaimana Merancang Pesantren Ramah Lingkungan?* Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014.

Mangunjaya, Fachruddin M. *Menanam sebelum kiamat: Islam, ekologi, dan gerakan lingkungan hidup*. Yogyakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007.

Mangunjaya, Fachruddin Majeri, and Gugah Praharawati. "Fatwas on Boosting Environmental Conservation in Indonesia." *Religions* 10, no. 10 (October 2019): 570. <https://doi.org/10.3390/rel10100570>.

Mardhiah, Izzatul, Rihlah Nur Aulia, and Sari Narulita, "Konsep Gerakan Ekoteologi Islam Studi Atas Ormas NU Dan Muhammadiyyah," *Jurnal Studi Al-Qur'an* 10, No. 1 (2014): 90.

Marshall, Paul. "The Ambiguities of Religious Freedom in Indonesia." *The Review of Faith & International Affairs* 16, no. 1 (January 2, 2018): 85–96. <https://doi.org/10.1080/15570274.2018.1433588>.

Moore, Jason W. "The Value of Everything? Work, Capital, and Historical Nature in the Capitalist World-Ecology." *Review (Fernand Braudel Center)* 37, no. 3–4 (2014): 245–92.

Muda, Yustinus Andi, "Ecotheology Menurut Seyyed Hossein Nasr dan Sallie McFague," *Jurnal Teologi (Journal of Theology)* 9, No. 1 (July 7, 2020): 73, <https://doi.org/10.24071/jt.v9i01.2040>.

Mudhoffir, Abdil Mughis. "Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan bagi Sosiologi Politik." *MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi* 18, no. 1 (September 14, 2013): 75–100–100. <https://doi.org/10.7454/mjs.v18i1.3734>.

Mufid, Moh. "Green Fatwas in Bahtsul Masā'il: Nahdlatul Ulama's Response to the Discourse on the Environmental Crisis in Indonesia." *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial* 15, no. 2 (December 29, 2020): 173–200. <https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v15i2.3956>.

Muhammad, Ahsin S, Husein Muhammad, Roqhib Mabrur, A Sudirman Abbas, and Amalia Firman. "Fiqh Lingkungan (Fiqh al-Bi'ah)." INFORM (Indonesia Forest and Media Campaign), Sukabumi 2004. https://www.academia.edu/download/37414619/fiqh_biah1-36.pdf.

Muhyiddin, Ahmad Shofi. "Dakwah Transformatif Kiai (Studi terhadap Gerakan Transformasi Sosial KH. Abdurrahman Wahid)." *Jurnal Ilmu Dakwah* 39, no. 1 (October 24, 2019): 1–14. <https://doi.org/10.21580/jid.v39.1.3934>.

Mujiburrahman. *Feeling Threatened: Muslim-Christian Relations in Indonesia's New Order*. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2006.

Muthmainnah, Lailiy, Rizal Mustansyir, and Sindung Tjahyadi. "Problem Intrinsik Dalam Agenda Pembangunan Berkelanjutan: Analisis Filsafat Politik Terhadap Pengelolaan Lingkungan Di Indonesia Pasca Reformasi." *JWP (Jurnal Wacana*

- Politik)* 6, no. 1 (March 6, 2021): 92–73. <https://doi.org/10.24198/jwp.v6i1.27801>.
- Naess, Arne. *Ecology, Community and Lifestyle: Outline of an Ecosophy*. Cambridge University Press, 1990.
- _____. *The Ecology of Wisdom: Writings by Arne Naess*. Catapult, 2009.
- Næss, Arne, and Bob Jickling. “Deep Ecology and Education: A Conversation with Arne Næss.” *Canadian Journal of Environmental Education (CJEE)* 5, no. 1 (January 1, 2000): 48–62.
- Nahdi, Maizer Said, and Aziz Ghufron. “Etika Lingkungan Dalam Perspektif Yusuf Al-Qaradawy.” *Al-Jami’ah: Journal of Islamic Studies* 44, no. 1 (June 1, 2006): 195–221. <https://doi.org/10.14421/ajis.2006.441.195-221>.
- Napitupulu, Nurasyah Dewi et al., “Ecotheology Dan Ecopedagogy: Upaya Mitigasi Terhadap Eksplorasi Alam Semesta,” *Voice of Wesley: Jurnal Ilmiah Musik dan Agama* 1, No. 2 (2018): 2, <https://doi.org/10.36972/jvow.v1i2.9>.
- Nasr, Seyyed Hossein, *A Young Muslim’s Guide to The Modern World* (Chicago: Kazi Publications, 2003), 6.
- Nufus, Hayatun. “Analisis Yuridis Terhadap Keputusan Tata Usaha Negara Dalam Ketentuan Pasal 3 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Dan Pasal 53 Ayat (2) Dan (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014.” *Jurnal Fatwa Hukum* 4, no. 1 (January 25, 2021). <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jfh/article/view/44498>.
- Nugroho, Sigit Sapto. *Hukum Konservasi Sumber Daya Alam & Keanekaragaman Hayati: Sebuah Dilema Antara Potensi & Ancaman Kepunahan*. Klaten: Penerbit Lakeisha, 2020.
- Nurmardiansyah, Eko. “Eco-Philosophy dan Implikasinya dalam Politik Hukum Lingkungan di Indonesia.” *MELINTAS* 30, no. 1 (April 1, 2014): 70–104. <https://doi.org/10.26593/mel.v30i1.1283.70-104>.
- Pepinsky, Thomas B. “Political Islam and the Limits of the Indonesian Model.” *Taiwan Journal of Democracy* 10, no. 1 (July 2014). https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=Political+Islam+and+the+Limits+of+the+Indonesian+Model&btnG=.
- Peluso, Nancy Lee, Suraya Afiff, and Noer Fauzi Rachman. “Claiming the Grounds for Reform: Agrarian and Environmental Movements in Indonesia.” *Journal of Agrarian Change* 8, no. 2 & 3 (July 2008).
- Pramestisari, Nyoman Ayu Sukma. “Dunia Dalam Cengkeraman Invisible Hand (Telaah Kritis Atas Globalisasi Melalui Mega Proyek Merauke Integrated Food and

- Energy Estate).” *Asketik: Jurnal Agama Dan Perubahan Sosial* 4, no. 2 (December 3, 2020): 163–74. <https://doi.org/10.30762/ask.v4i2.2305>.
- Pratomo, Hilmy. “Transformasi Metode Bahtsul Masail Nu Dalam Berinteraksi Dengan Al-Qur'an.” *Jurnal Lektur Keagamaan* 18, no. 1 (June 30, 2020): 109–34. <https://doi.org/10.31291/jlk.v18i1.620>.
- Pribadi, Airlangga. “Hegemoni Ideologi Neoliberalisme Dan Diskursus Demokrasi Di Indonesia.” *Jurnal Politik* 1, no. 1 (September 30, 2017): 23–35. <https://doi.org/10.7454/jp.v1i1.100>.
- Quddus, Abdul, “Ecotheology Islam: Teologi Konstruktif Atasi Krisis Lingkungan,” *Ulumuna* 16, No. 2 (2012): 312–313, <https://doi.org/10.20414/ujis.v16i2.181>.
- Rajab, Budi. “Negara Orde Baru: Berdiri Di Atas Sistem Ekonomi Dan Politik Yang Rapuh.” *Jurnal Sosiohumaniora* 6, no. 3 (November 2004): 182–202.
- Ramsay, Sylvia, and Jennifer Boddy. “Environmental Social Work: A Concept Analysis.” *The British Journal of Social Work* 47, no. 1 (January 1, 2017): 68–86. <https://doi.org/10.1093/bjsw/bcw078>.
- Rani, Faisyal. “Perspektif Green Thought Dalam Paradigma Baru Politik Internasional (Teori Dan Praktek).” *Transnasional* 4, no. 2 (May 23, 2013): 865–75.
- Rapik, Mohamad. “Dinamika Fikih Indonesia (Studi Atas Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Lingkungan Hidup).” *INOVATIF / Jurnal Ilmu Hukum* 12, no. 2 (2019). <https://online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/13214>.
- Ridwan, Sihab. “Bumi, Lingkungan, Dan Peradaban.” *JADE17: Jurnal Doktor Ekonomi* 1, no. 1 (October 16, 2016). <http://jurnal.untagsby.ac.id/index.php/JADE17/article/view/801>.
- Romdloni, Muhammad Afwan, and Muhammad Sukron Djazilan. “Kiai Dan Lingkungan Hidup; Revitalisasi Krisis Ekologis Berbasis Nilai Keagamaan Di Indonesia.” *Journal of Islamic Civilization* 1, no. 2 (October 28, 2019): 119–29. <https://doi.org/10.33086/jic.v1i2.1322>.
- Rose, Nikolas, Pat O’Malley, and Mariana Valverde. “Governmentality.” The University of Sydney, 2009.
- Rozaki, Abdur. *Menabur Karisma, Menuai Kuasa: Kiprah Kiai dan Blater Sebagai Rezim Kembar di Madura*. 1st ed. Yogyakarta: IRCISOD, 2021.
- Rustow, Dankwart A., and Salvator Attanasio. *Freedom and Domination: A Historical Critique of Civilization*. USA: Princeton University Press, 2014.
- Sardar, Ziauddin, *How Do You Know? Reading Ziauddin Sardar on Islam, Science and Cultural Relations* (London: Ann Arbor: Pluto Press, 2006), 91.

- Said, M. Yasir, and Yati Nurhayati. "Paradigma Filsafat Etika Lingkungan Dalam Menentukan Arah Politik Hukum Lingkungan." *Al-Adl : Jurnal Hukum* 12, no. 1 (January 26, 2020): 39–60. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v12i1.2598>.
- Salleh, Muhammad Syukri, Muhyarsyah, Muhammad Qorib, Mohd Shukri Hanapi, Warjio, Kasyful Mahalli, and Saprina Manurung. *Islamisasi Pembangunan*. Medan: UMSU Press, 2014.
- Santosa, Agus. *The Jokowi Secrets*. Yogyakarta: Gradien Mediatama, 2014.
- Satgar, Vishwas. "The Climate Crisis and Systemic Alternatives from the Climate Crisis: South African and Global Democratic Eco-Socialist Alternatives on Jstor." Accessed February 2, 2021. <https://www.jstor.org.online.uin-suka.ac.id/stable/10.18772/22018020541.6>.
- Schwab, Klaus. *Revolusi Industri Keempat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- Sessions, George S. "Anthropocentrism and the Environmental Crisis." *Humboldt Journal of Social Relations* 2, no. 1 (1974): 71–81.
- Setyaningrum, Wita. "Analisis Yuridis Implementasi Protokol Kyoto Di Indonesia Sebagai Negara Berkembang." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 1, no. 2 (August 8, 2015). <https://doi.org/10.23887/jkh.v1i2.6108>.
- Setyaningsih, Dewi. "Rezim Pembangunan Internasional: Dari Diskursus Hegemonik Hingga Kepengaturan Politik." *Review of International Relations* 3, no. 1 (August 1, 2021). <https://doi.org/10.24252/rir.v3i1.21975>.
- Sobary, Mohamad. *NU dan Keindonesiaaan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Sobri, Sobri. "Kejahatan Politik Dalam Pembangunan Dalam Kebijakan Pembangunan Industri Kehutanan Dan Perkebunan Di Provinsi Riau:" *SISI LAIN REALITA* 4, no. 1 (June 25, 2019): 70–89. [https://doi.org/10.25299/sislainrealita.2019.vol4\(1\).4050](https://doi.org/10.25299/sislainrealita.2019.vol4(1).4050).
- Solon, Pablo. "The Rights of Mother Earth." In *The Climate Crisis*. New York, NY: Wits University Press, n.d. <http://www.jstor.com/stable/10.18772/22018020541.10>.
- Suaedy, Ahmad. "The Role of Volunteers and Political Participation in the 2012 Jakarta Gubernatorial Election." *Journal of Current Southeast Asian Affairs* 33, no. 1 (April 1, 2014): 111–38. <https://doi.org/10.1177/186810341403300106>.
- Sukmawan, Sony, and M. Andhy Nurmansyah. "Etika Lingkungan Dalam Folklor Masyarakat Desa Tengger." *LITERASI: Indonesian Journal of Humanities* 2, no. 1 (August 29, 2014): 88–95.

- Sulubere, Muhammad Belanawane. "Neoliberalisme: Genealogi Konseptual, Relevansi Dan Implikasinya Terhadap Kebijakan Sosial Modern." *Sosio Informa* 2, no. 3 (December 22, 2016). <https://doi.org/10.33007/inf.v2i3.838>.
- Sumawinata, Sarbini. *Politik ekonomi kerakyatan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Suryawati, Chriswardani. "Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional." *JMPK* 8, no. 3 (2005). <https://journal.ugm.ac.id/jmpk/article/viewFile/2927/2646>.
- Susanto, Edi Susanto Edi. "Kepemimpinan [Kharismatik] Kyai Dalam Perspektif Masyarakat Madura." *KARSA: Journal of Social and Islamic Culture* 11, no. 1 (2012): 30–40.
- Sutrisno, Nandang, and Sigar Aji Poerana. "Reformasi Hukum Dan Realisasi Investasi Asing Pada Era Presiden Joko Widodo." *Undang: Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.22437/ujh.3.2.237-266>.
- Suyanto, Dr Bagong. *Sosiologi Ekonomi: Kapitalisme dan Konsumsi di Era Masyarakat Post-Modernisme*. Prenada Media, 2014.
- Taum, Yoseph Yapi. "Tragedi 1965 Dalam Karya-Karya Umar Kayam: Perspektif Antonio Gramsci." *Sintesis* 8, no. 1 (March 1, 2014): 11–22. <https://doi.org/10.24071/sin.v8i1.1015>.
- Teater, Barbra A. "Social Work Practice from an Ecological Perspective." In *Case Studies in Social Work Practice*. New York, NY: Wiley-Blackwell, 2014.
- Wardaya, F. X. Baskara Tulus. *Menguak misteri kekuasaan Soeharto*. Yogyakarta: Galangpress Group, 2007.
- White, Lynn, "The Historical Roots of Our Ecologic Crisis," in *Science* 155, No. 3767 (1967): 1203–1207 <http://www.jstor.org/stable/1720120>.
- Widiaryanto, Pungky. "Rasionalitas Kebijakan Konsepsi Hutan Dan Penghapusan Batas Minimal Kawasan Hutan 30 Persen." *GEMA PUBLICA : Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik* 5, no. 2 (October 30, 2020): 140–55. <https://doi.org/10.14710/gp.5.2.2020.140-155>.
- Wiratraman, R. Herlambang Perdana. "Neo-Liberalisme, Good Governance Dan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Hukum Jentera* XV (March 2007). <https://www.academia.edu/download/36949118/herlambang-neo-liberalisme-good-governance-dan-hak-asasi-manusia2.pdf>.
- Wittmer, Heidi, and Regina Birner. "Between Conservationism, Eco-Populism and Developmentalism: Discourses in Biodiversity Policy in Thailand and Indonesia." AgEcon Search, 2005. <https://doi.org/10.22004/ag.econ.42490>.

Yusran, and Afri Asnelly. "Kajian Green Politics Theory Dalam Upaya Menangani Krisis Ekologi Laut Indonesia Terkait Aktifitas Illegal Fishing." *Indonesian Journal of International Relations* 1, no. 2 (2017): 35–53. <https://doi.org/10.32787/ijir.v1i2.29>.

Zuhdi, Muhammad Harfin. "Rekonstruksi Fiqh Al-bāah Berbasis Maslahah: Solusi Islam terhadap Krisis Lingkungan." *Istinbath: Jurnal Hukum Islam IAIN Mataram* 14, no. 1 (2015): 41836.

Zuhir, Mada Apriandi, Ida Nurlinda, A. Dajaan Imami, and Idris Idris. "Indonesia Pasca Ratifikasi Perjanjian Paris 2015; Antara Komitmen Dan Realitas." *Bina Hukum Lingkungan* 1, no. 2 (August 6, 2017): 231–48. <https://doi.org/10.24970/bhl.v1i2.26>.

Sumber Internet

Alif. "Sumenep Kaya Fosfat." *Koran Madura* (blog), January 13, 2021. <https://www.koranmadura.com/2021/01/sumenep-kaya-fosfat/>.

Alif, Fathol. "Alih Fungsi Lahan Semakin Marak, Puluhan Pemuda Unjuk Rasa di Kantor DPRD Sumenep." *Koran Madura* (blog), March 9, 2020. <https://www.koranmadura.com/2020/03/alih-fungsi-lahan-semakin-marak-puluhan-pemuda-unjuk-rasa-di-kantor-dprd-sumenep/>.

Ari. "Tambak Udang di Desa Badur Belum Kantongi Izin." SantriNews, October 10, 2019. <https://jatim.santrinews.com/tambak-udang-di-desa-badur-belum-kantongi-izin/>.

Arifin, Badrul. "Akumulasi Primitif Dan Masalah Agraria Di Pesisir Sumenep." IndoPROGRESS, September 1, 2016. <https://indoprogress.com/2016/09/akumulasi-primitif-dan-masalah-agraria-di-pesisir-sumenep/>.

Asmara, Chandra Gian. "Pamer Omnibus Law Di WEF, Jokowi Undang Investor Asing Ke RI." news. Accessed June 27, 2021. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20201125200812-4-204688/pamer-omnibus-law-di-wef-jokowi-undang-investor-asing-ke-ri>.

Bahri, Zaiful. "Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2021, Alam Sumenep Semakin Rusak." SantriNews, June 5, 2021. <https://jatim.santrinews.com/hari-lingkungan-hidup-sedunia-2021-alam-sumenep-semakin-rusak/>.

Barus, Kormen. "Jumlah Penduduk Muslim Indonesia Meningkat, PowerCommerce Asia Tangkap Peluang, Luncurkan Halal Plaza." Industry.co.id, May 5, 2020. <https://www.industry.co.id/read/65748/jumlah-penduduk-muslim-indonesia-meningkat-powercommerce-asia-tangkap-peluang-luncurkan-halal-plaza>.

- Bisri, Musthofa. "Lima Perusahaan Asing Garap Ladang Migas Sumenep." *Tempo*, September 30, 2009. <https://bisnis.tempo.co/read/199974/lima-perusahaan-asing-garap-ladang-migas-sumenep>.
- Djarot, Eros. *Siapa sebenarnya Soeharto: fakta dan kesaksian para pelaku sejarah G-30-S/PKI*. Jakarta: MediaKita, 2006.
- Hantoro, Juli. "Tolak Proyek Bandara NYIA Kulon Progo, Massa Bakar Pos Polisi." *Tempo*, May 1, 2018. <https://nasional.tempo.co/read/1084801/tolak-proyek-bandara-nyia-kulon-progo-massa-bakar-pos-polisi>.
- . "Tolak Reklamasi, ForBali Sebut Teluk Benua Rawan Bencana." *Tempo*, August 6, 2019. <https://nasional.tempo.co/read/1232515/tolak-reklamasi-forbali-sebut-teluk-benua-rawan-bencana>.
- Hartono. "Diprediksi Capai 70 Juta Barel Minyak, KKKS EML Mulai Tajak Sumur Eksplorasi ENC-02 di Sumenep." *JDIH Sumenep - Bagian Hukum*. Accessed July 5, 2021. <http://jdih.sumenepkab.go.id/berita/detail/diprediksi-capai-70-juta-barel-minyak-kkks-eml-mulai-tajak-sumur-eksplorasi-enc02-di-sumenep>.
- Ily. "Tambak Udang Ilegal Marak, Sumenep Dianggap Hancur Akibat Perusakan Alam oleh Korporasi." *PETISI.CO* (blog), June 17, 2020. <https://petisi.co/tambak-udang-illegal-marak-sumenep-dianggap-hancur-akibat-perusakan-alam-oleh-korporasi/>.
- JDIH. "Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006." Accessed September 5, 2021. <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2009/4TAHUN2009UUPenj.htm>.
- Junaidi. "Delapan Perusahaan Migas Bereporasi Di Sumenep » Seputar Madura." Accessed April 7, 2021. <https://seputarmadura.com/sumenep/berita-sumenep/delapan-perusahaan-migas-bereporasi-sumenep/>.
- Junaidi, and Fathol Alif. "8 Perusahaan Migas Beroperasi." *Koran Madura* (blog), August 22, 2016. <https://www.koranmadura.com/2016/08/8-perusahaan-migas-beroperasi/>.
- "Massa FPI Di Sumenep Akhiri Aksi Dengan Bakar 'Bendera PKI' | Beritajatim.Com," July 10, 2020. <https://beritajatim.com/peristiwa/massa-fpi-di-sumenep-akhiri-aksi-dengan-bakar-bendera-pki/>.
- Media, Harian Jogja Digital. "Ini Luas Lahan Pertanian Yang Musnah Karena Proyek Bandara Kulonprogo." *Harianjogja.com*, January 18, 2018. <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2018/01/18/514/885889/ini-luas-lahan-pertanian-yang-musnah-karena-proyek-bandara-kulonprogo>.

Muraki, Ahmad. "Limbah Tambak Udang di Sumenep Cemarkan Lingkungan, di Soal Warga | IndonesiaPos." Accessed July 5, 2021. <https://indonesiapos.co.id/limbah-tambak-udang-di-sumenep-cemarkan-lingkungan-di-soal-warga/>.

"PERDA Kab. Sumenep No. 12 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumenep Tahun 2013-2033 [JDIH BPK RI]." Accessed September 5, 2021. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/56175>.

Publish What You Pay (PWYP) Indonesia. "Potret Migas Dan Pertambangan Di Provinsi Jawa Timur." 05:44:38 UTC. <https://www.slideshare.net/pwypindonesia/potret-migas-dan-pertambangan-di-provinsi-jawa-timur>.

Rozaki, "Social Origins and Political Power of Blaters (Thugs) in Madura | Kyoto Review of Southeast Asia," December 1, 2009. <https://kyotoreview.org/issue-11/the-social-origins-and-political-power-of-blaters-thugs-in-madura/>.

RRI 2021, LPP. "Ratusan Hektar Lahan Di Sumenep Mulai Dikuasai Investor Asing." <https://rri.co.id/sumenep/1135-sosial/291365/ratusan-hektar-lahan-di-sumenep-mulai-dikuasai-investor-asing>.

Suryajaya, Martin. "Antroposentrisme Dan Krisis Lingkungan Hidup." Martin Suryajaya, February 7, 2020. <https://www.martinsuryajaya.com/post/antroposentrisme-dan-krisis-lingkungan-hidup>.

Sutono. "Demi Masa Depan Sumenep, Para Kiai Tegas Tolak Tambang Fosfat." FaktualNews.co, March 31, 2021. <https://faktualnews.co/2021/03/31/demi-masa-depan-sumenep-para-kiai-tegas-tolak-tambang-fosfat/258533/>.

Tamimi, Moh. "Lahan Di Sumenep Terkapling-Kapling Dari Tambak Udang Sampai Tambang Fosfat." Mongabay.co.id, April 26, 2021. <https://www.mongabay.co.id/2021/04/26/lahan-di-sumenep-terkapling-kapling-dari-tambak-udang-sampai-tambang-fosfat/>.

———. "Masifnya Kerusakan Ekologi Sumenep | Kabar Madura," 2019. <https://kabarmadura.id/masifnya-kerusakan-ekologi-sumenep/>.

Taufiq, Muhammad. "Ulama dan Kyai Menolak Rencana Tambang Fosfat di Sumenep." suarajatimpost. Accessed July 7, 2021. <https://suarajatimpost.com/news/ulama-dan-kyai-menolak-rencana-tambang-fosfat-di-sumenep->.

WALHI. "Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta Konsisten Tolak Reklamasi," May 17, 2017. <https://www.walhi.or.id/koalisi-selamatkan-teluk-jakarta-konsisten-tolak-reklamasi>.

WALHI. "Riset Persepsi Publik Terhadap Kejahanatan Korporasi Dan Ekosida," January 4, 2021. <https://www.walhi.or.id/riset-persepsi-publik-terhadap-kejahanatan-korporasi-dan-ekosida>.

WALHI. "Hentikan Rencana Food Estate Di Papua (Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Food Estate Di Papua)," September 29, 2020. <https://www.walhi.or.id/hentikan-rencana-food-estate-di-papua-koalisi-masyarakat-sipil-tolak-food-estate-di-papua>.

WALHI. "Masa Depan Keadilan Ekologis Di Tahun Politik." 2019. https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjblYLmk8zxAhWFXSsKHaxVBj8QFnoECBQQAA&url=https%3A%2F%2Fwalhi.or.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F12%2FLayout_Tinjauan-Lingkungan-2018.pdf&usg=AOvVaw0L1ZqSDKQ2qRpPWgW4P2as.

WALHI "Riset Persepsi Publik Terhadap Kejahatan Korporasi Dan Ekosida," January 4, 2021, <https://www.walhi.or.id/riset-persepsi-publik-terhadap-kejahatan-korporasi-dan-ekosida>.

Warburton, Eve. "Jokowi and the New Developmentalism." *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 52, no. 3 (September 1, 2016): 297–320. <https://doi.org/10.1080/00074918.2016.1249262>.

———. "Resource Nationalism in Post -Boom Indonesia: The New Normal?" *Lowy Institue For International Policy*, April 27, 2017. <https://think-asia.org/handle/11540/7088>.

Warid, Faisal. "Kiai Dan Tomas Bersepakat Tolak Penambangan Fosfat Di Sumenep." rri.co.id. Accessed July 7, 2021. <https://rri.co.id/sumenep/1136-umum/1006229/kiai-dan-tomas-bersepakat-tolak-penambangan-fosfat-di-sumenep>.

Wilander, Arimacs. "Unjuk Rasa Tolak Pabrik Semen." tиро.id. Accessed June 27, 2021. <https://tиро.id/unjuk-rasa-tolak-pabrik-semen-chav>.

Zaini. "Sempat Mencuat Ke Publik, Kasus Limbah Tambak Udang Kembali Tenggelam?" *Beritadata* (blog), January 27, 2021. <https://beritadata.id/sempat-mencuat-ke-publik-kasus-limbah-tambak-udang-kembali-tenggelam/>.

Informan

Wawancara dengan K. Dardiri Zubair, Aktivis Lingkungan dan Pengasuh Pondok Pesantren Nasyi'atul Mut'allimin Gapura Timur.

Wawancara dengan Bapak Kahir, mantan Kabag ESDA Sumenep tahun 2018.

Wawancara dengan Bapak Darul Hasyim Fath, Ketua Komisi I DPRD Sumenep dari Fraksi PDIPP. Wawancara ini dilakukan melalui sambungan telpon.

Wawancara dengan Bapak Zaifudin, aktivis di Sumenep.

Wawancara dengan Kiai Moh. Naqib Hasan, Pengasuh Pondok Pesantren Annuqayah Guluk-Guluk dan Juru bicara Forum Sumenep Hijau.

Wawancara dengan Kiai Hafid Sulaiman, pengasuh pondok pesantren Darun Najah.

Wawancara dengan KH. Jurjiz Muzammil Ketua Forum Kiai Muda Madura (FORKIM) sekaligus Ketua FPI Sumenep. KH. Jurjiz Muzammil adalah sosok kiai yang memiliki pesantren salafi terbesar di Sumenep yaitu Ponpes Al-Is'af Kalabaan, dan dikenal sebagai sosok yang anti PDIPP dan PKI oleh masyarakat Guluk-Guluk, Sumenep.

Wawancara dengan Kiai Yasin, Ketua Muhammadiyah Sumenep. Selain itu kiai Yasin juga merupakan pengurus MUI Sumenep.

Wawancara dengan Kiai Qumri Rahman, Ketua GP Ansor Sumenep dan pengurus NU Cabang Sumenep.

Wawancara dengan Moh. Rusydi, seorang tokoh masyarakat di desa Bragung.

Wawancara dengan Kiai Hilmi, Pengasuh Pondok Pesantren Annuqayah, Guluk-Guluk.

Wawancara dengan Bapak Hosaini Adhim, Politisi PAN dan menjabat sebagai Anggota DPRD Periode 2009-2014 dan 2014-2019. Sebelumnya Hosaini adalah seorang Dosen di INSTIKA (Institute Ilmu Keislaman Annuqayah) 2005-2008.

Wawancara dengan Bapak Maswan, Tokoh masyarakat di Kecamatan Dungkek. Menurut Maswan pada tahun 1994 (tahun dirinya mulai menekuni profesi nelayan) profesi nelayan masih sangat bagus dan sangat membantu masyarakat pesisir di dalam memenuhi kebutuhan dasar, ikan-ikan di sepanjang pinggir pantai masih sangat banyak dan bisa ditangkap dengan mudah, hingga pada dekade tahun 2000-2015-an usaha tambak udang mulai masuk ke daerah pesisir Sumenep dan merusak ekosistem lautan karena limbahnya yang tidak diatur dengan baik oleh pemiliknya. Sejak saat itu, laut yang menjadi ladang utama mata pencaharian masyarakat pesisir perlahan berubah, laut mulai ditinggalkan dan masyarakat pesisir memilih untuk merantau menjadi buruh migran atau membangun usaha-usaha kecil di kota-kota besar seperti Surabaya, Jakarta, dan Bali atau merantau ke luar negeri seperti Malaysia dan Arab Saudi.

Wawancara dengan Bapak Muzanni, Sekretaris GP Ansor Sumenep.

Wawancara dengan juru bicara Forum Sumenep Hijau, Kiai Moh. Naqib Hasan dan ketua FORKIM Kiai Jurjiz Muzammil

Observasi terhadap dinamika keberagamaan kelompok Forum Sumenep Hijau dan Forum Kiai Muda Madura.

Observasi di Kec.Guluk-Guluk, Kec.Ambunten, dan Kec.Batu Putih

Hasil observasi di tempat produksi *serbuk* di Sumenep, di antaranya kecamatan Guluk-Guluk, Kecamatan Ambunten, dan Kecamatan Lenteng.

Observasi di Ponpes. Annuqayah dan Ponpes Kalabaan.

Observasi di pemerintah Kabupaten Sumenep

Observasi di dalam gerakan FORKIM (Forum Kiai Muda Madura) dan Forum Sumenep Hijau.

Observasi di Kecamatan Agraris Guluk-Guluk.

Observasi di Kec. Ganding, Kec. Guluk-Guluk, Kec. Pragaan.

